

**FORMULASI KEBIJAKAN  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH  
(Studi Tentang Model Rasional Komprehensif  
Terhadap Formulasi Kebijakan)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

***Nur Aini Fadilah***  
**1916041066**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**FORMULASI KEBIJAKAN  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH  
(Studi Tentang Model Rasional Komprehensif  
Terhadap Formulasi Kebijakan)**

Oleh

*Nur Aini Fadilah*

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **FORMULASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH (STUDI TENTANG MODEL RASIONAL KOMPREHENSIF TERHADAP FORMULASI KEBIJAKAN)**

**Oleh**

**Nur Aini Fadilah**

DPRD Kabupaten Lampung Utara membuat sebuah kebijakan penanggulangan kemiskinan untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahap dari proses perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara berdasarkan model rasional komprehensif. Selain itu tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui aktor yang terlibat serta faktor apa saja yang mempengaruhi formulasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dirumuskan oleh DPRD Kabupaten Lampung Utara ini ideal ketika ditinjau menggunakan model rasional komprehensif dalam menganalisis tahap kebijakan tersebut. Tahap tersebut meliputi perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan dan beberapa elemen pada model rasional komprehensif. Selain tahap formulasi kebijakan, dalam penelitian ini juga meneliti tentang aktor yang terlibat dan faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan. Aktor yang terlibat sebagai pemeran serta resmi ialah DPRD Kabupaten Lampung Utara, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara, Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, dan Kementerian Sosial RI dan pemeran serta tidak resmi ialah akademisi.

**Kata Kunci:** *Formulasi Kebijakan, Rasional Komprehensif, Aktor Formulasi Kebijakan, Faktor Yang Mempengaruhi Formulasi Kebijakan, Kemiskinan*

## **ABSTRACT**

### **REGIONAL POVERTY REDUCTION POLICY FORMULATION (STUDY OF COMPREHENSIVE RATIONAL MODEL OF POLICY FORMULATION)**

**By**

**Nur Aini Fadilah**

*The North Lampung Regency DPRD made a poverty alleviation policy to reduce the poverty rate in North Lampung Regency. This study aims to determine the stages of the process of formulating poverty alleviation policies in North Lampung Regency based on a comprehensive rational model. In addition, the purpose of this study is to find out the actors involved and what factors influence policy formulation. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. The results of the study show that the poverty alleviation policy formulated by the DPRD of North Lampung Regency is ideal when viewed using a comprehensive rational model in analyzing the stages of the policy. This stage includes the formulation of the problem, the policy agenda, the selection of alternative policies, and the establishment of policies and several elements in a comprehensive rational model. In addition to the policy formulation stage, this research also examines the actors involved and the factors that influence policy formulation. The actors involved as official actors are the North Lampung Regency DPRD, the Legal Section of the North Lampung Regency Regional Secretariat, the North Lampung Regency Social Service, the Lampung Province People's Welfare Bureau, and the Indonesian Ministry of Social Affairs and the actors and unofficial actors are academics.*

**Keywords:** *Policy Formulation, Comprehensive Rationale, Actor Policy Formulation, Factors Influencing Policy Formulation, Poverty*

Judul Skripsi : **FORMULASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DI DAERAH  
(Studi Tentang Model Rasional Komprehensif  
Terhadap Formulasi Kebijakan)**

Nama Mahasiswa : **Nur Aini Fadilah**

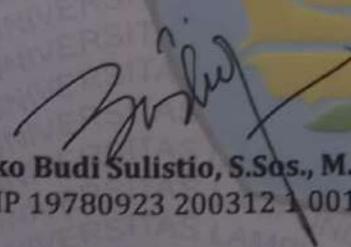
No. Pokok Mahasiswa : **1916041066**

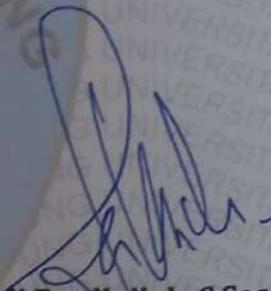
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

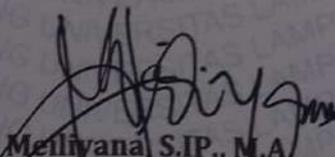


**1. Komisi Pembimbing**

  
**Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**  
NIP 19780923 200312 1 001

  
**Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.**  
NIP 19880712 201903 1 012

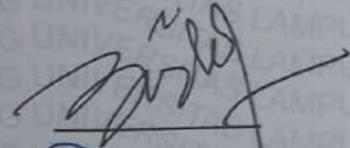
**2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

  
**Meiliyana S.IP., M.A**  
NIP 19740520 200112 2 002

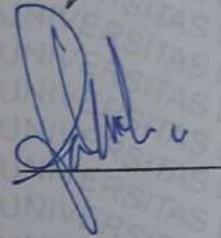
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**



**Sekretaris : Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.**



**Penguji Utama : Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Ida Nurhaida, M.Si.**

**NIP. 19610807 198703 2 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juni 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 23 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Nur Ami Fadilah  
1916041066

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Nur Aini Fadilah, penulis dilahirkan pada 21 Mei 2001 di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara kandung dari pasangan Bapak Afrizal dan Ibu Sri Setiyaningsih. Memulai jenjang Pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 153 Suka Makmur pada tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2013 menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 12 Muaro Jambi, kemudian penulis menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Muaro Jambi pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Penulis diterima melalui jalur SBMPTN dan tergabung dalam Himpunan Administrasi Negara (HIMAGARA). Pada tahun 2022 di bulan Januari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bumi Mandiri Kabupaten Lampung Utara selama 40 hari.

Melanjutkan perjalanan selama masa perkuliahan telah penulis lalui selama hampir empat tahun. Semua ini dilakukan penulis sebagai mewujudkan keinginan dan membanggakan kedua orang tua, meskipun banyak halangan dan rintangan yang dihadapi namun penulis tetap yakin bahwa semua itu merupakan salah satu proses perjalanan kehidupan yang harus dilalui, karena penulis yakin dengan adanya usaha semua akan menikmati hasil.

## *MOTTO*

**Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah**

**(Q.S Al Ghafir : 44)**

**Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya**

**(Q.S Al Baqarah : 286)**

**Bergantunglah kepada doa seakan-akan kamu tidak tahu obat selainnya**

**(Nur Aini Fadilah)**

**Berbuat baiklah selagi bisa, karena kebaikan akan mendatangimu**

**(Nur Aini Fadilah)**

## PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan Syukur kepada Allah SWT  
Atas segala limpahan nikmat dan hidayah-Nya

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati,  
Kupersembahkan karya tulis ini,  
Untuk orang-orang yang aku sayangi dan kucintai:

### **Ayahanda tercinta Afrizal dan Ibunda tercinta Sri Setyaningsih**

Yang selalu mendoakan dan memberikan semangat atas segala pencapaian ini.  
Terimakasih untuk segala pengorbanan, arahan dan bimbingan, serta kasih sayang  
yang tulus yang kalian berikan kepada saya. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan  
karena telah dilahirkan dari orang tua hebat seperti Ayah dan Ibu.

### **Adikku tersayang Enggar Herlambang**

Yang selalu mendoakan dan berbagi kebahagiaan untuk menghibur aku di  
sepanjang waktu.

### **Para Dosen dan Civitas Akademika**

Yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta dukungan dan doa

Almamater Tercinta,

UNIVERSITAS LAMPUNG

## SANWACANA



*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur penulis ucapkan atas segala berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya serta berkat doa dan restu dari kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“FORMULASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH (STUDI TENTANG MODEL RASIONAL KOMPREHENSIF TERHADAP FORMULASI KEBIJAKAN)”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Negara (S.A.N) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali kesulitan yang dihadapi dari awal hingga selesai penulisannya. Berkat bantuan, bimbingan, dorongan serta saran dari berbagai pihak, segala kesulitan tersebut Alhamdulillah dapat diatasi dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain :

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Ita Prihantika, S. Sos., M.A, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP . selaku dosen pembimbing utama.

Terimakasih banyak untuk segala bimbingan, saran, dan masukan yang Bapak berikan untuk perkembangan skripsi saya. Segala ilmu yang Bapak sampaikan pada proses bimbingan merupakan tambahan wawasan dan pelajaran baru untuk saya, Terimakasih Bapak, telah sabar membimbing dan memberikan masukan secara terperinci. Terimakasih telah membimbing saya selama proses bimbingan. Semoga Bapak selalu diberikan kemudahan, kesehatan dan kelancaran dalam segala hal kedepannya.

5. Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing kedua. Terimakasih banyak atas segala ilmu, bimbingan, motivasi, nasehat serta waktu dan kesabaran yang telah diberikan selama proses bimbingan. Saran dan masukan dari Bapak sangat berguna bagi perjalanan skripsi saya sampai akhir. Semoga Bapak selalu diberikan kemudahan, kesehatan dan kelancaran dalam segala hal kedepannya.
6. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si. selaku dosen penguji. Terimakasih telah memberikan ilmu pengetahuan di dalam perkuliahan dan telah memberikan saran maupun masukan yang sangat amat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan selama penulisan skripsi ini. Semoga Bapak selaludiberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam segala hal kedepannya.
7. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) penulis. Terimakasih atas bimbingan, ilmu, saran maupun masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam segala hal kedepannya.
8. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih atas ilmu untuk seluruh dedikasi yang diberikan dalam mengajar para mahasiswa selama proses perkuliahan. Semoga ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis dan mahasiswa lainnya.
9. Mbak Wulan dan Pak Juhari selaku Staff Administrasi Negara. Terimakasih telah memfasilitasi dan membantu penulis dalam kelancaran skripsi hingga akhir. Semoga Mba Wulan dan Pak Juhari selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam segala hal kedepannya.

10. Seluruh pimpinan dan pegawai pada bagian Persidangan dan bagian Hukum dan Perundang-Undangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara yang telah menerima dan memberikan ilmu, arahan, informasi selama magang 6 bulan. Semoga Ibu dan Bapak selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam segala hal kedepannya.
11. Seluruh informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara. Terimakasih atas masukan, informasi, saran serta arahan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi hingga akhir.
12. Kedua orangtua tersayang Ayah Afrizal dan Ibu Sri Setyaningsih, terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua limpahan kasih sayang, pengorbanan, didikan, motivasi, perhatian dan doanya serta kerja keras ayah dan ibu dalam membantu rani meraih gelar sarjana. Semoga Allah SWT selalu memberikan kelimpahan berkah serta kesehatan umur panjang kepada ayah dan ibu. Doakan anakmu agar terus bisa teguh beriman di jalan Allah SWT dan bisa memberikan kebahagiaan kepada ayah dan ibu. Terimakasih karena selalu mengerti setiap keadaan tidak baik-baik saja dan selalu bersedia menjadi tempat rani untuk mengadu.
13. Adikku tersayang, Enggar Herlambang terimakasih telah bersedia menemani dan memberikan semangat kepada penulis selama melakukan penelitian. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan meridhoi Enggar dalam setiap langkah yang diambil dan selalu diberikan kemudahan setiap langkahnya dalam menuju kesuksesan.
14. Terimakasih untuk teman pertama ku di Lampung Tiara Audia dan sekarang menjadi sahabat, yang telah bersedia menemani peneliti dari maba hingga titik akhir perjuangan dalam mencapai gelar sarjana. Terimakasih atas segala semangat, pengorbanan, saran, dan ilmunya, serta telah banyak meluangkan waktu untuk penulis dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi yang penuh perjuangan ini. Semoga tiara selalu diberikan kelancaran dan kemudahan, serta keberkahan disetiap langkah tiara dan semoga tali silaturahmi kita tetap hangat walau dipisahkan tempat asal yang berbeda.
15. Terimakasih untuk mba Nenden yang sejak maba telah bersedia penulis mintai bantuan. Makasih banyak mba Nenden karena sudah bersedia meminjamkan

buku-buku perkuliahan untuk bahan bagi rani memahami materi perkuliahan. Makasih banyak karena sudah mau rani tanya-tanya selama kuliah ini terlebih soal perskripsian dan selalui gupek ke mba Nenden. Semoga silaturahmi kita terjalin sampai nanti dan semoga mba Nenden selalu dalam lindungan Allah SWT aamiin.

16. Terimakasih untuk mba Gustia, yang selama penulis menyelesaikan skripsi selalu memberikan bantuan, saran, dan masukan. Kebaikan mba tya yang sudah membantu rani dalam pengerjaan skripsi ini, terimakasih juga atas kesabaran mba tya selama rani bertanya-tanya tentang skripsi walaupun mba tya bekerja, namun masih menyempatkan waktu untuk membantu rani dalam menyusun skripsi. Semoga mba tya diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan, serta karir mba tya semakin meningkat, dan semoga setelah perskripsian ini silaturahmi kita tetap terjaga.
17. Sahabatku tersayang Yayin, Mega, dan Sherly yang selalu memberikan motivasi, saran, waktu dan tempat berkeluh kesah selama berteman dengan kalian. Bersyukur dipertemukan dengan kalian dan menjadi sahabat yang baik. Semoga kita kelak berhasil, sukses dan dapat bertemu dilain hari dengan cerita yang pastinya bahagia.
18. Sahabat KKN ku Nimas, Yopa, Ajeng, dan Reki walaupun kita dipertemukan dipenghujung masa perkuliahan, namun kasih sayang dan ketulusan kalian memberikan ruang tersendiri di hati penulis. Terimakasih kalian telah membersamai penulis sampai saat ini. Semoga kalian bertiga diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan untuk masa depan.
19. Teman magangku selama 6 bulan, Agata dan Ayu. Terimakasih telah membersamai dalam kepusingan mengerjakan tugas magang, terimakasih sudah membantu dalam segala hal. Semoga pertemanan kita akan berlanjut walau sudah memiliki kesibukan masing-masing.
20. Untuk Banda Neira, Nadin Amizah, Hindia, Kunto Aji, Sal Priadi, dan Fourtwnty, terimakasih atas karya-karyanya yang telah menemani penulis dalam menghadapi kebingungan anak muda mencari jati diri. Lagu-lagu kalian telah membawa suasana yang tenang sehingga menjadikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga lahir kembali karya-karya

yang baru untuk anak muda yang memerlukan motivasi.

21. Keluarga besarku dari pihak ayah dan ibu yang tidak bisa peneliti sebutkan satu- persatu. Terimakasih sudah mau membantu rani dalam penelitian ini dan dijadikan tempat untuk berkeluh kesah. Semoga persaudaraan kita tetap harmonis.
22. Semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas bantuannya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih besar untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hanya ucapan terimakasih dan doa yang dapat penulis berikan.
23. Terakhir untuk Rani, terimakasih sudah berjuang sejauh ini walau perasaan menyerah datang kapan saja, pikiran berisik yang menyelimuti kepala mu sudah berhasil kamu kurangi, walaupun kehidupan selanjutnya akan lebih banyak rintangan yang dihadapi, terimakasih sudah kuat.

Akhir kata, penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran agar karya tulis selanjutnya dapat lebih baik. Sedikit harapan penulis, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Bandar Lampung, 23 Juni 20223

Penulis,

**Nur Aini Fadilah**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Pengertian Kebijakan Publik .....	11
2.3 Proses Kebijakan Publik.....	12
2.4 Formulasi Kebijakan Publik.....	15
2.4.1 Pengertian Formulasi Kebijakan Publik .....	15
2.4.2 Model-model Formulasi Kebijakan Publik.....	16
2.4.3 Tahap Formulasi Kebijakan Publik.....	24
2.4.4 Aktor-aktor Dalam Formulasi Kebijakan Publik .....	28
2.4.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Formulasi Kebijakan.....	30
2.5 Kemiskinan.....	32
2.6 Masyarakat Miskin .....	33
2.7 Kerangka Pikir.....	35
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	36
3.2 Fokus Penelitian .....	37

3.3	Lokasi Penelitian .....	38
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.5	Teknik analisis data .....	40
3.6	Teknik Keabsahan Data.....	41
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>45</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
4.1.1	Deskripsi Wilayah Kabupaten Lampung Utara .....	45
4.1.2	Topografi Kabupaten Lampung Utara .....	46
4.2	Gambaran Umum DPRD Kabupaten Lampung Utara .....	46
4.2.1	Profil DPRD Kabupaten Lampung Utara .....	46
4.2.2	Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Lampung Utara .....	47
4.2.3	Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Lampung Utara .....	49
4.2.4	Visi dan Misi DPRD Kabupaten Lampung Utara.....	51
4.2.5	Gambaran Cakupan Kegiatan atau Wilayah Pelayanan.....	51
4.3	Aktor Yang Terlibat dalam Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.....	51
4.4	Proses Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Model Rasional Komprehensif.....	63
4.5	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Formulasi Kebijakan .....	98
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>106</b>
5.1	Kesimpulan.....	106
5.2	Saran.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>114</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Utara 2019-2021.....	3
Tabel 2. Informan Penelitian.....	39
Tabel 3. Daftar Dokumen Yang Berkaitan Dengan Penelitian .....	39
Tabel 4. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2020 .....	65
Tabel 5. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Lampung Utara (2020).....	66
Tabel 6. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi Yang Dimiliki Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 .....	67
Tabel 7. Permasalahan Lain di Kabupaten Lampung Utara Yang Masuk Ke Dalam Agenda Kebijakan.....	78

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Kerangka Berfikir .....	35
Gambar 2. Teknik Analisis Data .....	40
Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Lampung Utara .....	50
Gambar 4. Kegiatan BAPEMPERDA dalam Membentuk Kebijakan Publik.....	54
Gambar 5. DPRD Kabupaten Lampung Utara Melaksanakan Paripurna Tingkat 1 Membahas Judul-Judul yang akan dibuatkan PERDA .....	64
Gambar 6. Kabupaten Lampung Utara sebagai Kabupaten Termiskin di Provinsi Lampung .....	69
Gambar 7. Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara 2016-2021 .....	70
Gambar 8. Akademisi Melaksanakan Penyusunan NA dan Mentahan RAPERDA .....	86
Gambar 9. Panitia Khusus Melakukan Rapat Bersama Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.....	89
Gambar 10. Konsultasi Panitia Khusus Dengan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung dan Kementerian Sosial RI .....	90
Gambar 11. Badan Musyawarah Melakukan Rapat Persiapan Paripurna Pengesahan RAPERDA Penanggulangan Kemiskinan .....	91
Gambar 12. Anggota Dewan DPRD Kabupaten Lampung Utara Melaksanakan Paripurna Pengesahan RAPERDA Penanggulangan Kemiskinan Bersama Tiga Kebijakan Lainnya .....	92

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Isu mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan telah lama diperbincangkan di berbagai belahan dunia, hal tersebut karena kemiskinan merupakan permasalahan yang krusial. Seperti halnya Amerika Serikat, Amerika Serikat sudah 75 tahun gagal dalam menanggulangi kemiskinan. Hal tersebut karena lembaga yang ada saat itu *official poverty measure* (OPM) gagal dalam melaksanakan tugasnya. Amerika Serikat kemudian menghadirkan lembaga baru yaitu *supplemental poverty measure* (SPM). SPM ini dalam pelaksanaannya memiliki tugas yaitu memperhitungkan kredit pajak anak, serta nilai manfaat dari program *supplemental nutrition assistance program* (SNAP) atau program bantuan nutrisi yang ada di Amerika Serikat Berger et al (2018). Lain halnya dengan China, pemerintahan China juga mengambil tindakan dalam penanggulangan kemiskinan dengan membuat sebuah kebijakan yaitu kebijakan pertanahan. Kebijakan pertanahan ini berkolaborasi dengan *ex-situ poverty alleviation* (ESPAR) bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di China. ESPAR merupakan sebuah proyek mata pencaharian seperti investasi modal di perumahan atau pemukiman, layanan umum dasar, infrastruktur pendukung, fasilitas produksi dan kehidupan, dan rehabilitas ekologis daerah yang direlokasi (Zhou et al., 2018).

Kebijakan penanggulangan kemiskinan selalu aktual mengikuti perkembangan masalah pada kondisi terkini. Hal tersebut menjadikan adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk dapat secara bersama-sama

memformulasikan kebijakan dengan tepat Hajra (2022). Kebijakan yang dijalankan dalam penanggulangan kemiskinan berisikan program-program untuk mendukung kebijakan yang telah dibuat tersebut, pastinya program yang ada mengikuti kondisi atau kebutuhan masyarakat yang ada pada saat ini Rukmi (2017). Banyaknya pengemis, anak jalanan, gelandangan di sepanjang jalanan Kotabumi, serta banyaknya pelaku usaha yang gulung tikar. Kondisi tersebut menggambarkan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Lampung Utara cukup ironi.

Penjelasan penelitian terdahulu terdapat relevansi dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu menunjukkan upaya DPRD Kabupaten Lampung Utara untuk menanggulangi kemiskinan dengan menjalankan program pada sebuah kebijakan yang dibuat dan pastinya disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan terkini. Namun, dalam penelitian yang peneliti lakukan terdapat kebaharuan, yaitu dalam formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan ini peneliti menggunakan model rasional komprehensif dalam menganalisis proses formulasi kebijakannya.

Formulasi kebijakan yang tidak tepat akan menghambat dari proses pembuatan kebijakan itu sendiri, sehingga menyebabkan pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan akan gagal Li et al (2019). Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012) dalam Ani, Serli dan Budi Sulistio (2017) implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, pemerintah maupun swasta, yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sehingga pelaksanaan kebijakan yang sudah dibuat pada dasarnya haruslah mendatangkan manfaat bagi penerima kebijakan tersebut yaitu masyarakat. Para elit politis haruslah memperhatikan pandangan para masyarakat guna memenuhi kebutuhan pada saat perumusan atau formulasi sebuah kebijakan publik. Walaupun nantinya kebijakan publik yang dibuat akan mendatangkan protes dari masyarakat itu sendiri, namun masyarakat haruslah tetap dilibatkan dalam kegiatan formulasi kebijakan publik Sechele (2018). Menurut Paul Cairney (2020), pemahaman mengenai pembuatan

kebijakan publik atau formulasi kebijakan publik memberitahukan informasi mengenai bagaimana sebuah kebijakan publik harus dibuat. Menurut nya saat ini pembuatan atau formulasi kebijakan publik dilakukan dengan berbasis bukti atau *evidence-based policy making* (EBPM) Cairney (2020).

Sebelumnya Kabupaten Lampung Utara telah memiliki sebuah PERDA penanggulangan kemiskinan yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Namun PERDA tersebut belum optimal dalam menanggulangi kasus kemiskinan, hal tersebut diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung yang menunjukkan pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Utara kembali mengalami peningkatan. Sehingga, hal tersebut mengkonfirmasi kembali terhadap apa yang dikatakan oleh Chambers tentang perangkap kemiskinan (*deprivation trap*). Menurut Chambers (1997) dalam Sidqi & Mahmudin (2019) terdapat lima unsur perangkap kemiskinan, yang meliputi kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan atau kadar isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Utara 2019-2021**

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)		
	2019	2020	2021
Lampung Utara	122.650	119.350	121.910

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (2022)

Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Lampung Utara, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Utara (2021) tingkat pendidikan masyarakatnya yang masih rendah yaitu Sekolah Dasar (SD) menjadi salah satu faktor penyebabnya. Masyarakat dengan tamatan Sekolah Dasar memiliki angkatan kerja terbanyak. Namun untuk zaman seperti saat ini, mengandalkan pendidikan dengan tamatan Sekolah Dasar tidak dapat berharap lebih dalam menghasilkan pendapatan yang besar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga kemiskinan ini merupakan jenis kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang terjadi akibat rendahnya pemberian

akses kepada sumber daya yang umumnya hal tersebut terjadi dalam tatanan sosial budaya dan politik yang kurang mendukung adanya pembebasan terhadap kemiskinan tersebut Jacobus et al (2019). Selain kualitas SDMnya yang rendah, menurut Tabrani Rajab penyebab kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Lampung Utara ialah masyarakat Kabupaten Lampung Utara yang kurang mendukung pelaku UMKM baik dibidang barang maupun jasa. Masyarakat Kabupaten Lampung Utara lebih memilih di luar daerah Kabupaten Lampung Utara karena dianggap lebih menarik dan banyak pilihan. Hal tersebut berimbas banyaknya pelaku usaha yang gulung tikar atau bangkrut akibat minat pembeli yang sedikit untuk membeli atau menggunakan jasa para pelaku UMKM di Kabupaten Lampung Utara. Jika pelaku usaha mengalami kebangkrutan akan mengakibatkan pemasukan atau penghasilan untuk mencukupi kehidupan akan semakin sulit dan berdampak terhadap meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara.

Menurut keterangan Kabag Hukum dan Perundang-undangan Syahrullah, dari adanya permasalahan tersebut DPRD Kabupaten Lampung Utara berupaya untuk dapat membebaskan masyarakatnya dari kondisi kemiskinan yang pastinya memilih program-program yang disesuaikan dengan kedua kondisi tersebut. Adapun program dari kebijakan penanggulangan kemiskinan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro.

DPRD Kabupaten Lampung Utara yang menjadi salah satu pihak yang melakukan dan melaksanakan formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara dalam rangka melaksanakan fungsi legislasinya. DPRD sendiri memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, fungsi legislasi adalah membentuk Peraturan Daerah (PERDA) yang dilaksanakan bersama-sama dengan Kepala Daerah. PERDA disusun sebagai bahan pengelolaan hukum di tingkat daerah

yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah dan menampung aspirasi dari masyarakat daerah. Kemudian fungsi anggaran, dimana DPRD memiliki hak anggaran yaitu hak *budget* yang dapat ikut serta dalam penyusunan Anggaran Belanja Tahunan Daerah. Hak *budget* ini termasuk kedalam fungsi kontrol bukan fungsi anggaran, karena fungsi anggaran merupakan kekuasaan eksekutif, sehingga DPRD dapat mengontrol dalam penetapan sumber pendapatan dan belanja daerah kurun waktu satu tahun. Terakhir adalah fungsi pengawasan, DPRD yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan di daerah menjalankan salah satu fungsi manajemen pemerintahan daerah yaitu fungsi kontrol dan pengawasan Syuaib (2020).

Menurut keterangan Kasubag Pengkajian Hukum Akhmad Faizal, pembentukan kebijakan berupa Peraturan Daerah (PERDA) dilakukan berdasarkan usul inisiatif yang diberikan oleh DPRD Kabupaten Lampung Utara yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA). Usul inisiatif oleh BAPEMPERDA dilakukan perumusan untuk menentukan judul PERDA dari permasalahan yang ada. Proses formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan ini berpedoman terhadap model rasional komprehensif, dalam model rasional komprehensif terdapat beberapa elemen yang akan membantu pelaksanaan formulasi kebijakan, yaitu untuk melihat keluaran kebijakan yang rasional dengan memaparkan beberapa alternatif kebijakan. Kebijakan yang rasional yaitu sebuah kebijakan yang efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya Winarno (2014).

Maka dari itu, formulasi kebijakan sangat dibutuhkan sebagai bentuk penanganan terhadap masalah yang ada. Hal tersebut dilakukan agar angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Lampung Utara dapat menurun dan masyarakat dapat merasakan kehidupan yang bermartabat dan adil. Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti **“FORMULASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH (Studi Tentang Model Rasional Komprehensif Terhadap Formulasi Kebijakan)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut.

1. Siapa sajakah yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan?
2. Bagaimana proses formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan model rasional komprehensif?
3. Faktor yang mempengaruhi proses formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pihak yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara, yang terdiri dari pemeran serta resmi dan pemeran serta tidak resmi. Terdapat dua jenis aktor dalam perumusan kebijakan, dikarenakan tidak semua aktor memiliki kewenangan yang sah dalam memutuskan sebuah kebijakan.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana proses formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan model rasional komprehensif. Hal tersebut merupakan tahap dari formulasi kebijakan yang terdiri dari perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan dan juga melihat unsur-unsur yang terdapat pada model rasional komprehensif. Tahap-tahap dalam formulasi akan menjelaskan bagaimana kebijakan yang baik itu dibuat, serta menggunakan model rasional komprehensif dalam melihat apakah proses dari tahap formulasi kebijakan sudah sesuai dengan unsur-unsur yang ada di model rasional komprehensif.
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi proses formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lmapung Utara, baik dari

adanya pengaruh tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, adanya pengaruh sifat pribadi, adanya pengaruh dari kelompok luar, dan adanya pengaruh keadaan masa lalu. Setiap faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dari formulasi kebijakan, pastinya akan mempengaruhi keluaran dari kebijakan yang dibuat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi pemikiran serta penambahan ilmu pengetahuan dalam kajian Ilmu Administrasi Negara yang mengkaji tentang formulasi kebijakan publik dalam mata kuliah kebijakan publik, bahwa dalam menyusun sebuah kebijakan akan melalui beberapa tahap yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan dan penetapan kebijakan. Dalam pelaksanaan proses tersebut peneliti menggunakan model rasional komprehensif untuk melihat apakah kebijakan yang di buat ideal atau tidak. Serta dalam penggunaan model rasional tersebut pastinya memiliki keterbatasan-keterbatasan didalamnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi DPRD Kabupaten Lampung Utara, sehingga menjadikan sebuah umpan balik (*feedback*) dalam memperbaiki proses penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lampung Utara dengan memperhatikan setiap langkah-langkah yang ada pada proses penyusunan kebijakan publik. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan tepat dan memberikan manfaat yang besar bagi penerimanya. Serta bagi para pembaca semoga penelitian ini bermanfaat.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lawrence M. Berger, Maria Cancian, dan Katherine Magnuson, bahwasannya Amerika Serikat sudah 75 tahun gagal dalam menanggulangi kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan lembaga yang ada saat itu *official poverty measure* (OPM) gagal dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga Amerika Serikat menghadirkan lembaga baru yaitu *supplemental poverty measure* (SPM). SPM ini dalam pelaksanaannya memiliki tugas yaitu memperhitungkan kredit pajak anak, serta nilai manfaat dari program *supplemental nutrition assistance program* (SNAP) atau kehidupan, dan rehabilitas ekologis daerah yang direlokasi Berger et al (2018). Relevansi penelitian ini yaitu sama-sama meneliti upaya yang dilakukan pemerintah ketika upaya yang dilakukan sebelumnya belum optimal dalam menanggulangi kemiskinan, yang kemudian pemerintah menghadirkan upaya baru seperti Amerika Serikat menghadirkan lembaga baru yaitu SPM untuk menjalani program penanggulangan kemiskinan dan DPRD Kabupaten Lampung Utara yang membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian menurut Yang Zhou, Yuanzhi Guo, Yansui Liu, Wenxiang Wu, Yurui Li. Dalam penelitian ini, Pemerintahan China melakukan tindakan dalam penanggulangan kemiskinan dengan membuat sebuah kebijakan yaitu kebijakan pertanahan. Kebijakan pertanahan ini berkolaborasi dengan *ex-situ poverty alleviation* (ESPAR) bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di China. ESPAR merupakan sebuah proyek mata pencaharian

seperti investasi modal di perumahan atau pemukiman, layanan umum dasar, infrastruktur pendukung, fasilitas produksi dan kehidupan, dan rehabilitasi ekologis daerah yang direlokasi Zhou et al (2018). Relevansi penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu ini yaitu sama-sama meneliti tentang upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dengan membuat sebuah program yang disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan saat ini.

Kemudian penelitian terdahulu oleh Irwan Abdu Nugraha, pemerintah Daerah Sragen merumuskan kebijakan yang disebut UTPK (Unit Pelaksana Teknis Penanggulangan Kemiskinan) karena kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah disusun masih terpisah-pisah, sehingga warga Kabupaten Sragen harus melalui proses birokrasi yang panjang. Namun proses formulasi kebijakan UTPK ini dijalankan oleh Bupati berdasarkan dengan PERBUP yang ada belum ada pembahasan dengan DPRD dalam formulasi sebuah PERDA sebagai payung hukumnya Irwan Abdu Nugraha (2017). Relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sama-sama meneliti upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Selain itu terdapat kemiripan teori tahap formulasi kebijakan, pada penelitian terdahulu tahap formulasi meliputi formulasi masalah, agenda kebijakan, dan penetapan kebijakan. Sedangkan tahap dalam penelitian ini meliputi perumusan masalah, agenda kebijakan, pemelihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan. Jika dilihat terdapat beberapa tahap yang sama yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian oleh Dwi Ilhami, permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini ialah DPR RI sebagai lembaga yang memiliki fungsi dalam membuat sebuah kebijakan sering kali menyepelekan aspek substansi daripada aspek kepentingan. Komunikasi kebijakan yang dilakukan menjadi salah satu bagian dari sebuah kepentingan politik yang justru tidak efektif, yang terbukti dalam terjadinya kontroversi Rancangan Undang-Undang Anti

Pornografi dan Pornoaksi yang berubah menjadi Rancangan Undang-Undang Pornografi pada tahun 2008. Dengan adanya pemrasalahan tersebut akhirnya memunculkan sebuah pertanyaan bagaimana komunikasi politik dalam memandang Undang-Undang Pornografi ini dan langkah-langkah yang dilakukan dalam sebuah komunikasi kebijakan berdasarkan model rasional komprehensif Ilhami (2011). Sehingga dalam penelitian terdahulu ini memiliki sebuah relevansi yaitu penggunaan model rasional komprehensif dalam melihat penetapan perubahan kebijakannya. Walaupun kajian kebijakan berbeda, namun terdapat kesamaan model yang digunakan, yang dapat dipakai sebagai acuan yang peneliti gunakan dalam penelitiannya saat ini.

Selanjutnya penelitian oleh Dempo Xler dan Sugeng Suharto. Dalam penelitian ini, masyarakat terus mengeluh kepada pemerintah tentang kemiskinan dan ketersediaan lapangan kerja. Masyarakat menyatakan bahwa mengatasi kemiskinan dapat dengan mudah dicapai melalui modal sederhana dan melalui dukungan keterampilan dengan pendekatan *public hearing*. Maka pemerintah memilih RAPERDA Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu sebagai solusinya Xler (2022). Relevansi antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini dalam proses formulasi meliputi perumusan masalah, isu kebijakan dan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, penetapan kebijakan. Teori tersebut sama dengan teori yang peneliti pakai dalam penelitiannya yaitu teori oleh Winarno (2014) meliputi perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan. Selain itu juga dalam penelitian terdahulu ini juga membahas mengenai keterlibatan (partisipasi) dalam proses formulasi, dan hal tersebut juga akan peneliti bahas dalam penelitiannya.

Penelitian yang peneliti lakukan terdapat kebaruan yaitu menganalisis sebuah formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan

dengan model rasional komprehensif. Selain itu kebaruan yang disajikan oleh peneliti ialah menggunakan teori Winarno (2014) sebagai tahap perumusan kebijakan yang meliputi perumusan masalah (*defining problem*), agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan berdasarkan model rasional komprehensif.

## **2.2 Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik dapat membantu memecahkan masalah yang muncul saat ini. Dengan menerapkan kebijakan publik yang lebih baik, dapat memberi dampak kualitas pelayanan publik yang lebih tangguh, adil dan juga lebih efektif (Dunlop et al., 2020). Kebijakan publik merupakan sebuah pemanfaatan sumber daya yang tersedia guna memecahkan permasalahan publik atau pemerintah. Kebijakan publik juga merupakan sebuah bentuk investasi yang dilanjutkan oleh pemerintah guna memberikan kepentingan kepada orang-orang yang tak berdaya dalam masyarakat, yang kemudian mereka dapat hidup dan juga ikut untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (Ralph C, Chandler, Jack C, 1988). Menurut Dunn (1994), mengatakan kebijakan publik merupakan sebuah rangkaian terhadap pilihan-pilihan yang mempunyai keterkaitan yang disusun oleh suatu lembaga atau pejabat pemerintah terhadap bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertanian, kriminalitas, perkotaan dan lain sebagainya.

Di Indonesia, sebagian besar kebijakan publik terjadi ketika pembuat kebijakan membutuhkannya. Misalnya dalam fenomena ketika pembuat kebijakan hanya perlu suara dalam pemilu dan menggandeng persoalan pemilu dalam obral janjinya. Sehingga, kemiskinan ini akan menjadi senjata ampuh untuk digunakan saat musim pemilu oleh Presiden, Gubernur, maupun Bupati/Walikota. Selain kebijakan publik dalam periode pemilu, kebijakan dikembangkan ketika undang-undang perlu disahkan. Maka dari itu peran administrator publik juga sangat dinantikan. Administrator publik

harus mampu menginterpretasikan kebijakan dan aturan serta mengimplementasikan program dan layanan yang ditulis untuk menegakkan kebijakan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses dan layanan yang sama, termasuk meningkatkan dan mencapai standar hidup (Salam, 2019).

Sehingga, dari beberapa penjelasan pengertian kebijakan publik oleh para ahli dan penelitian yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk dapat memecahkan masalah publik yang ada. Kebijakan publik mempertimbangkan kebutuhan rakyat dan juga mempertimbangkan aspirasi dan ketidakpuasan rakyat, sehingga dengan begitu kebijakan yang dirumuskan akan membawa manfaat yang besar atau luas bagi masyarakat.

### **2.3 Proses Kebijakan Publik**

Proses kebijakan publik merupakan sebuah proses yang cukup kompleks karena akan melibatkan banyak proses dan variabel yang harus dilakukan pengkajian. Maka dari itu beberapa ahli mengkaji tentang proses kebijakan publik dan membagi proses-proses tersebut kedalam beberapa tahapan. Berikut proses kebijakan publik yang dikemukakan oleh William Dunn (1999) dalam Budi Winarno (2014).

- a. Penyusunan agenda, mengatakan para pejabat publik yang dipilih dan diangkat akan menempatkan atau memposisikan masalah publik kedalam agenda publik. Masalah-masalah yang ada sebelumnya terlebih dahulu berkompetisi untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada tahap ini beberapa masalah yang ada mungkin tidak disentuh sama sekali, namun masalah lainnya ditetapkan menjadi fokus bahasan. Namun adapula masalah karena adanya alasan-alasan tertentu ditunda untuk beberapa waktu yang lama.

- b. Formulasi kebijakan, mengatakan masalah yang telah masuk kedalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Para pembuat kebijakan akan mendefinisikan masalah yang ada dan kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah yang ada berasal dari alternatif atau pilihan-pilihan kebijakan yang ada, namun sebelumnya alternatif-alternatif yang ada tersebut akan diseleksi untuk dapat diambil dalam memecahkan masalah yang ada tersebut. Pada tahap ini, aktor-aktor terkait akan melakukan cara untuk dapat mengusulkan dan menghasilkan pemecahan masalah yang terbaik.
- c. Adopsi kebijakan, mengatakan dari banyaknya alternatif yang diusulkan oleh pembuat kebijakan, maka salah satu alternatif tersebut akan diadopsi dengan dukungan oleh mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
- d. Implementasi kebijakan, mengatakan keputusan program kebijakan publik yang diambil dari alternatif kebijakan haruslah dilaksanakan atau diimplementasikan yang dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Pada tahap implementasi kebijakan publik ini kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya akan saling bersaing, yang dalam hal tersebut beberapa kebijakan publik akan mendapatkan sebuah dukungan dari para implementor, namun ada pula beberapa kebijakan yang lain akan ditentang oleh implementor. Terdapat berbagai macam cara yang digunakan oleh implementor agar tujuan dari sebuah kebijakan yang telah dibuat dapat tercapai. Dengan mengembangkan kerangka pikir yang dibangun dengan cara sendiri atau dengan cara mereplikasi, mengkombinasi atau mensinergikan, serta mengembangkan pendapat yang disampaikan oleh pakar-pakar tentang model implementasi kebijakan. Keberhasilan dari implementasi sebuah kebijakan juga dapat dilihat atau dikaji melalui proses implementasi (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil) Duadji Noverman (2021).
- e. Evaluasi kebijakan, mengatakan kebijakan publik yang telah dijalankan atau dilaksanakan sebelumnya akan dilakukan sebuah penilaian atau

evaluasi. Evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut mampu memecahkan permasalahan yang ada sebelumnya. Sehingga terdapat sebuah ukuran atau kriteria untuk melihat atau menilai apakah kebijakan yang telah dijalankan memberikan dampak terhadap sasarannya.

Thomas R. Dye (1992) dalam (Widodo, 2021) proses dari sebuah kebijakan publik meliputi:

- a. Identifikasi masalah kebijakan, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan identifikasi masalah ini dapat dimulai dengan melakukan identifikasi apa saja yang menjadikan tuntutan atas tindakan pemerintah.
- b. Penyusunan agenda, mengatakan penyusunan agenda ini merupakan sebuah aktivitas yang difokuskan kepada sebuah perhatian para pejabat publik serta media massa atas keputusan yang akan diputuskan terhadap sebuah masalah publik.
- c. Formulasi kebijakan, mengatakan pada tahap formulasi kebijakan ini merupakan tahap mengusulkan rumusan kebijakan dan penyusunan atas usulan kebijakan yang ada yang berasal dari organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, serta lembaga legislatif.
- d. Pengesahan kebijakan, mengatakan pengesahan kebijakan ini dilakukan melalui tindakan politik yang dilakukan oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.
- e. Implementasi kebijakan, mengatakan pelaksanaan implementasi ini dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.
- f. Evaluasi kebijakan, mengatakan pelaksanaan evaluasi dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, konsultan diluar pemerintah, pers, serta masyarakat.

## 2.4 Formulasi Kebijakan Publik

### 2.4.1 Pengertian Formulasi Kebijakan Publik

Anderson (1970) berpendapat mengenai formulasi kebijakan, menurutnya formulasi kebijakan menyangkut terhadap upaya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap berbagai alternatif yang ada dan telah disepakati masalah-masalah yang ada sebelumnya tersebut untuk dapat dikembangkan dan siapa saja yang terkait atau berpartisipasi didalam pelaksanaannya. Cairney (2020), pemahaman mengenai pembuatan kebijakan publik atau formulasi kebijakan publik memberitahukan informasi mengenai bagaimana sebuah kebijakan publik harus dibuat. Menurut nya saat ini pembuatan atau formulasi kebijakan publik dilakukan dengan berbasis bukti atau *evidence-based policy making* (EBPM). EBPM ini sangat menarik, dimana dalam pelaksanaan formulasi kebijakan publik, merangkum perdebatan-perdebatan yang klasik terhadap studi kebijakan publik mengenai potensi pertukaran (*trade-off*) antara ketergantungan terhadap keahlian (akademisi) dan bukti yang ada pada kebijakan publik (pembuat kebijakan), serta kebutuhan untuk dapat mendorong partisipasi khalayak ramai atau masyarakat untuk dapat memastikan proses dari formulasi kebijakan publik yang baik. Namun, ketegangan antara keahlian dan partisipasi dapat dilihat dalam pelaksanaannya, seperti para pembuat kebijakan publik akan mencoba untuk dapat menggabungkan faktor-faktor yang relevan dalam formulasi kebijakan publik, bukti penelitian, opini publik, keyakinan, dan pandangan mereka terhadap kebijakan yang layak secara politik, sehingga akan menghasilkan keputusan yang terbaik dalam situasi yang menantang.

Dunn (2000) dalam Meta (2018) mengatakan formulasi kebijakan merupakan sebuah pengembangan terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah yang ada. Sulistino (2013) dalam Meta (2018) juga berpendapat

mengenai formulasi kebijakan, ia mengatakan formulasi kebijakan merupakan sebuah pengembangan terhadap alternatif-alternatif kebijakan yang ada dan hal tersebut digunakan untuk menghadapi masalah-masalah yang ada dalam sebuah agenda publik. Pendapat lainnya yang dikemukakan oleh Bintari (2016) dalam Rahmayuni (2021), mengatakan formulasi kebijakan merupakan salah satu proses yang ada dalam tahapan pembuatan dan pelaksanaan terhadap kebijakan publik. Secara teoritis perumusan kebijakan atau formulasi kebijakan merupakan pengembangan dari alternatif-alternatif masalah yang ada, proses formulasi kebijakan ini memerlukan waktu yang cukup panjang serta memerlukan komunikasi politik yang tinggi, yang dilakukan sebagai pilihan oleh pemerintah dalam melakukan atau tidak melakukan sebuah pengambilan keputusan (Rahmayuni et al., 2021).

Oleh karena itu, dari uraian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan merupakan suatu proses perancangan kebijakan publik yang diawali dengan pengembangan berbagai alternatif kebijakan yang ada untuk menjawab isu-isu yang menjadi agenda publik. Proses formulasi kebijakan publik itu sendiri berlangsung bersama birokrasi pemerintahan, kelompok kepentingan, lembaga legislatif, dan organisasi yang melakukan perencanaan kebijakan. Hal ini sejalan dengan rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Lampung Utara sebagai badan legislatif yang ada.

#### **2.4.2 Model-model Formulasi Kebijakan Publik**

Dalam formulasi kebijakan, terdapat pula model formulasi kebijakan publik menurut Thomas Dye (1995) dalam (Mutia, 2017) mengatakan terdapat sembilan model formulasi kebijakan yang meliputi;

a. Model kelembagaan, peran pemerintah dalam mewujudkan kebijakan merupakan salah satu kunci, pemerintah (lembaga legislatif) memiliki tugas yaitu membuat kebijakan. Sehingga apapun yang dikeluarkan atau dibuat oleh pemerintah merupakan kebijakan publik. Thomas Dye (1995) dalam (Mutia, 2017) membenarkan penjelasan tersebut dikarenakan 3 alasan yaitu:

1. Pemerintah merupakan sebuah lembaga yang sah dalam hal membuat sebuah kebijakan,
2. Pemerintah memiliki fungsi universal.
3. Pemerintah memiliki hak monopoli dalam hal ini pemerintah memiliki fungsi pemaksaan.

Namun model kelembagaan ini memiliki sebuah kelemahan yaitu terabaikannya masalah dilingkungan tempat diberlakukannya kebijakan yang dikarenakan dalam pembuatan kebijakan tidak terjadinya interaksi dengan lingkungan tersebut.

- b. Model proses menegaskan bahwa politik adalah aktivitas dengan proses atau politik merupakan sebuah aktivitas sehingga memiliki proses didalamnya. Proses tersebut meliputi identifikasi masalah, menata agenda formulasi kebijakan, perumusan proposal kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan.
- c. Model kelompok adalah teori yang memperlakukan kebijakan sebagai jenis titik keseimbangan. Menurut Wibawa (1994) dalam (Mutia, 2017) mengatakan terdapat beberapa kelompok kepentingan yang berusaha untuk dapat mempengaruhi isi dan bentuk sebuah kebijakan yang dilakukan secara interaktif.
- d. Model elit, teori ini merupakan perpanjangan dari teori massa elitis, yang berpandangan bahwa ada dua jenis kelompok yaitu mereka yang memiliki kekuasaan dan mereka yang tidak. Dalam model ini, kebijakan yang dikeluarkan bias dari sebuah kepentingan para kelompok elit dengan tujuan untuk mempertahankan status quo. Sehingga dalam model elit ini menjadikan masyarakatnya sebagai partisipan dalam pembuatan kebijakan.

- e. Model rasional, ia menekankan bahwa mereka yang membuat kebijakan harus memilih kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat umum.
- f. Model inkremental, merupakan teori yang berasal dari kritik teori rasional, hal tersebut dikarenakan pembuat kebijakan tidak cukup waktu, intelektual dan biaya. Kebijakan inkremental ini akan berusaha untuk mempertahankan komitmen kebijakan pada masa lalu untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai selama ini. Namun pengambilan kebijakan di masa lalu ini akan berdampak negatif contohnya dalam kebijakan pemerintahan tentang desentralisasi, kepartaian, dan lainnya.
- g. Model teori permainan, teori ini muncul ketika pendekatan yang sangat rasional gagal menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dan sulit dijelaskan dengan menggunakan bukti yang tersedia.
- h. Model pilihan publik, teori yang dimaksud mengkaji prosedur untuk merumuskan kebijakan yang mencakup semua pihak yang memiliki kepentingan dalam kebijakan tersebut. Pada dasarnya model ini merupakan model yang paling demokratis, hal tersebut dikarenakan dalam model ini memberikan ruang kepada publik untuk mengkontribusikan pilihannya kepada pemerintah sebelum dilakukannya pengambilan keputusan. Namun sering terjadi, kebijakan yang diambil tersebut merupakan kepentingan dari pendukung partai-partai tertentu, sehingga pemuasan yang diberikan hanya dirasakan oleh sepihak yaitu pada pemilih.
- i. Model sistem David Easton, model ini memiliki fokus terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah namun lupa tentang hal yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

Winarno (2014) mengatakan terdapat enam model dari formulasi kebijakan publik yang meliputi model sistem, model rasional komprehensif, model kepuasan, model inkremental, model penyelidikan campuran (*mixedscanning*), dan model kualitatif optimal, berikut penjelasan dari ketujuh model:

- a. Model sistem, dalam model sistem ini mengatakan kebijakan publik berasal dari suatu sistem politik. Konsep dari sebuah sistem sendiri merujuk pada sebuah lembaga beserta kegiatan yang dapat dilihat di tengah masyarakat yang mengubah sebuah tuntutan menjadi sebuah keputusan yang otoritatif.
- b. Model rasional komprehensif, model rasional komprehensif merupakan model formulasi kebijakan yang melihat pencapaian tujuan yang dilakukan secara efisien. Model rasional komprehensif ini merupakan model yang perumusan kebijakan yang paling terkenal dan paling diterima bagi kalangan pengkaji kebijakan publik. Dimana model ini akan memudahkan para pembuat kebijakan dalam menghadapi masalah publik yang ada. Nantinya masalah yang ada tersebut dapat dipisahkan dengan masalah lainnya atau masalah tersebut akan terlihat berbeda dengan masalah yang ada lainnya. Model ini memiliki beberapa elemen yang meliputi:
  1. Para pembuat keputusan akan menghadapi masalah-masalah tertentu. Masalah tersebut dipisahkan dengan masalah lainnya atau masalah tersebut lebih penting daripada masalah lainnya.
  2. Para pembuat keputusan menjelaskan tujuan, nilai, serta sasaran yang ditujukan pada pembuat keputusan akan dijelaskan dan kemudian disusun sesuai dengan arti pentingnya.
  3. Para pembuat keputusan mengidentifikasi berbagai alternatif yang digunakan dalam mengatasi masalah yang perlu untuk diselidiki.
  4. Para pembuat keputusan mempertimbangkan konsekuensi (pengorbanan dan keuntungan) yang timbul pada setiap pemilihan alternatif diteliti.
  5. Setiap alternatif serta konsekuensi yang ada dapat dilakukan perbandingan dengan alternatif lainnya.
  6. Para pembuat keputusan akan memilih dan memiliki alternatif bersama dengan konsekuensinya untuk memaksimalkan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Namun menurut Charles E. Lindblom dalam Winarno (2014) model rasional komprehensif ini memiliki sejumlah kritik yang dilontarkan oleh beberapa ahli.

- a. Para pembuat keputusan tidak dihadapkan dalam masalah yang konkret dan jelas, para pembuat keputusan seringkali tidak berhasil dalam mendefinisikan masalah yang jelas tersebut, sehingga keputusan yang dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan menjadi tidak tepat. Contohnya seperti kasus kemiskinan, permasalahan kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh rendahnya motivasi kerja serta keterampilan atau pendidikan masyarakat atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berpihak terhadap kelompok tertentu sehingga terjadilah kemiskinan.
- b. Model komprehensif menurut para pengkritik tidak realistis terhadap tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh pembuat keputusan. Hal tersebut dikarenakan para pembuat keputusan seringkali dihadapkan oleh waktu yang tidak memadai yang diakibatkan desakan masalah yang membutuhkan penanganan secepat mungkin.
- c. Para pembuat kebijakan umumnya akan dihadapkan dalam kondisi konflik daripada terhadap kesepakatan nilai.
- d. Kenyataan yang terjadi ialah para pembuat keputusan tidak memiliki motivasi dalam menetapkan keputusan yang berdasarkan pada tujuan masyarakat, namun sebaliknya mereka memaksimalkan ganjaran mereka seperti kekuasaan, kedudukan, motivasi, yang hal tersebut terjadi agar mereka terpilih kembali dalam pemilu yang akan datang.
- e. Pembuat keputusan memiliki hambatan, kebutuhan, serta kekurangan yang menyebabkan si pembuat keputusan tidak mengambil keputusan berdasarkan rasionalitas yang tinggi.
- f. Pembuat keputusan tidak memiliki kecakapan yang cukup dalam menghitung rasio biaya serta keuntungan dengan tepat jika sejumlah besar nilai berbeda seperti politik, ekonomi, sosial, budaya yang akan menjadi taruhannya.

- g. Investasi dalam program pada sebuah kebijakan menyebabkan pembuat keputusan tidak mempertimbangkan kembali alternatif yang telah ditetapkan sebelumnya.
- h. Banyaknya hambatan yang terjadi dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan.

Selain itu Ira Sharkansky (1975) dalam Winarno (2014) menyebutkan terdapat lima hambatan yang akan dihadapi pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan, hal tersebut meliputi:

- a. Masalah, tujuan, serta komitmen kebijakan dipaksakan dan dijauhkan dari pembuat kebijakan oleh aktor yang berada di lingkungan administrasi.
- b. Hambatan dalam mengumpulkan informasi-informasi yang memadai tentang tujuan dan kebijakan yang dapat diterima.
- c. Kebutuhan pribadi, komitmen, hambatan, dan ketidakmampuan dari pembuat keputusan akan mengakibatkan gangguan penilaian terhadap tujuan dan kebijakan yang dapat diterima yang dilihat dari sudut pandang agensi mereka.
- d. Kesulitan struktural dalam unit administrasi serta melibatkan cabang-cabang atau pihak lain pemerintah legislatif.
- e. Adanya perilaku yang menyimpang dari para pengurus.

Menurut Hoogerwerf dalam Islamy (1988) dalam Mulyana et al (2019) bahwa model rasional komprehensif ini adalah salah satu kegiatan analisis yang berasal dari sudut hasil atau dampak yang memiliki maksud bahwa proses perumusan kebijakan publik itu akan memberikan dampak yang baik, jika didasarkan pada proses pemikiran yang rasional yang pastinya didukung oleh data maupun informasi yang lengkap (komprehensif). Kegiatan analisis pastinya dilakukan dengan sangat teliti, cermat, dan detail dengan memanfaatkan sejumlah besar data maupun informasi yang harus dikumpulkan, sehingga menghasilkan sebuah kebijakan yang memberikan dampak positif.

- c. Model kepuasan, asumsi terhadap model ini ialah dalam pencarian alternatif harus melalui dua tahap, tahap pertama pencarian sebuah alternatif didasarkan pada presiden dan melakukan evaluasi sesuai dengan tingkat aspirasi yang memuaskan. Tahap kedua, jika tidak ada alternatif yang muncul, alternatif baru akan dievaluasi yang disesuaikan dengan tingkat aspirasi yang secara berbeda dapat memuaskan.
- d. Model inkremental, model inkremental lahir dari kritik terhadap model rasional komprehensif sebelumnya. Model inkremental ini dimaksudkan untuk dapat menutupi kekurangan yang ada pada model rasional komprehensif. Model inkremental ini bersifat deskriptif, karena model ini sebenarnya menggambarkan metode yang digunakan pejabat untuk mengambil keputusan Winarno (2014). Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam model inkremental yang meliputi:
  1. Pemilihan tujuan maupun sasaran yang ada serta analisis empirik terhadap tindakan yang dibutuhkan, sehingga kedua hal tersebut merupakan hal yang saling berkaitan dan bukanlah hal yang berbeda.
  2. Para pembuat kebijakan publik harus dapat mempertimbangkan beberapa alternatif yang tersedia yang digunakan untuk menanggulangi masalah yang ada. Alternatif-alternatif yang ada tersebut hanya berada secara marginal terhadap kebijakan yang sudah ada sebelumnya.
  3. Untuk setiap alternatif yang tersedia para pembuat kebijakan hanya dapat mengevaluasi beberapa konsekuensi yang hanya dianggap penting.
  4. Masalah yang dihadapi para pembuat kebijakan haruslah berkesinambungan atau relevan. Maka dari itu model inkremental digunakan untuk menyesuaikan tujuan serta sasaran sehingga memungkinkan masalah yang ada dapat dikendalikan.
  5. Tidak adanya keputusan yang tunggal atau penyelesaian permasalahan yang ada dianggap tepat. Hal tersebut dikarenakan dalam proses ini harus melewati tahap analisis dalam rangka memecahkan persoalan yang sedang dihadapi.

6. Pembuat kebijakan publik hanya merupakan remedial dan diarahkan untuk dapat lebih banyak melakukan perbaikan kedepannya. Perbaikan tersebut dilakukan terhadap ketidaksempurnaan social yang ada saat ini daripada mempromosikan tujuan social dimasa mendatang.

Oleh karena itu, model inkremental mempertimbangkan pluralitas atau toleransi dalam pengambilan kebijakan publik. Ini didasarkan pada kesepakatan bersama dari banyak pemangku kepentingan. Oleh karena itu, mengambil keputusan yang bijak akan mudah dicapai ketika masalah yang ada di antara berbagai kelompok masyarakat muncul dalam bentuk perubahan program yang ada Winarno (2014).

- e. Model *mixed scanning*, merupakan sebuah pendekatan yang menggabungkan antara model inkremental dan rasionalisme, sehingga dengan begitu dapat mempromosikan sebuah masyarakat yang aktif. Dalam hal ini masyarakat yang aktif ialah orang-orangnya terdapat kolektivitas sosial, atau masyarakat tersebut dapat memahami dirinya sendiri dan mampu memformulasikan masyarakat tersebut sesuai dengan nilainya sendiri.
- f. Terakhir model kualitatif optimal, model kualitatif optimal dikemukakan oleh seorang tokoh bernama Yehezkel Dror yang dijelaskan dalam bukunya yaitu *Public Policymaking Reexamined* (1968), dan *Ventures in Policy Sciences: Concepts and Application* (1971) dalam Winarno (2014). Model optimal yang dikembangkan oleh Dror ini dirancang atau disusun dalam rangka untuk mengkoreksi model-model pembentukan kebijakan lainnya dan menjadikannya sebuah pedoman bagi pembentukan kebijakan yang kualitatif.

Maka dari itu, dari penjelasan macam-macam model formulasi kebijakan, model rasional komprehensif digunakan sebagai acuan dalam formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lampung Utara, hal tersebut dikarenakan

pelaksanaan formulasi penanggulangan kemiskinan tersebut akan melihat masalah-masalah serta alternatif yang ada dalam perumusan kebijakannya.

### **2.4.3 Tahap Formulasi Kebijakan Publik**

Selain model terdapat pula tahap formulasi kebijakan, menurut Widodo (2007) dalam Alaslan (2021), tahap dari formulasi kebijakan publik memiliki paling tidak empat tahapan dalam pelaksanaan proses formulasi kebijakan publik. Tahap tersebut meliputi identifikasi masalah, penyusunan agenda, Formulasi masalah kebijakan publik, dan mendesain kebijakan.

- a. Identifikasi masalah, pada tahap ini dilakukan untuk mengenali permasalahan yang ada, permasalahan tersebut akan dijadikan dasar dari sebuah kebijakan. sehingga identifikasi masalah ini harus dilakukan pemetaan situasi masalah dengan mengamati perubahan-perubahan yang terjadi di setiap lingkungan.
- b. Penyusunan agenda, penyusunan agenda merupakan sebuah kegiatan agar masalah publik yang ada menjadi sebuah masalah kebijakan.
- c. Formulasi masalah kebijakan publik, perumusan sebuah masalah pada dasarnya diawali dengan adanya situasi masalah, hal tersebut adalah serangkaian situasi yang memunculkan sebuah perasaan ketidakpuasan dan terdapat sesuatu yang salah sehingga dilakukannya pengenalan masalah.
- d. Mendesain kebijakan, setelah masalah yang ada sebelumnya dirumuskan dan masalah tersebut menjadi masalah formal, kemudian masalah tersebut dicarikan atau diberikan solusi berupa kebijakan publik yang perlu diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hasbullah (2015) dalam Sudartono dan Rachmandhani (2021) berpendapat bahwa tahap dari formulasi kebijakan terdiri dari identifikasi isu kebijakan, penyusunan agenda kebijakan, membuat proposal kebijakan, dan

pengesahan rumusan kebijakan. Berikut penjelasan tahap formulasi kebijakan menurut Hasbullah (2015):

- a. Identifikasi isu kebijakan, identifikasi isu kebijakan dapat juga dikatakan sebagai perumusan masalah. Perumusan masalah sangatlah penting dikarenakan dalam proses formulasi perumusan masalah ini memakan waktu yang cukup lama. Hal tersebut dikarenakan, jika dalam perumusan masalah terdapat kesalahan, maka kebijakan yang dibuat akan berakibat fatal dan akan menemukan hambatan-hambatan yang cukup serius di lapangan.
- b. Penyusunan agenda kebijakan, masalah-masalah yang telah terkumpul sebelumnya kemudian akan dipilih masalah yang paling krusial sampai dengan masalah yang tidak krusial untuk di lakukannya agenda. Dijejerkanya masalah yang paling krusial sampai dengan masalah yang tidak krusial dilakukan karena tidak semua masalah yang ada masuk kedalam agenda kebijakan.
- c. Membuat proposal kebijakan, proposal kebijakan dapat juga dikatakan sebagai serangkaian yang arahnya adalah penyusunan dan pengembangan terhadap alternatif-alternatif tindakan yang digunakan dalam memecahkan sebuah masalah kebijakan.
- d. Pengesahan rumusan kebijakan, rumusan kebijakan yang ada akan dianggap final atau sah apabila rumusan tersebut di sahkan oleh peserta perumusan kebijakan formal. Pengesahan merupakan konstitusional alternatif pemecahan masalah yang telah dipilih selama proses formulasi kebijakan.

Kemudian Winarno (2014) terdapat empat tahap dalam fomulasi kebijakan publik yang meliputi:

- a. Tahap pertama adalah perumusan masalah (*defining problem*). Pada tahap ini, pengambil kebijakan harus mampu mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang ada. Perumusan masalah ini merupakan langkah awal dalam merumuskan kebijakan publik. Mengembangkan kebijakan publik yang baik membutuhkan

- identifikasi yang cermat dan definisi yang tepat dari masalah publik yang ada. Pada dasarnya, kebijakan publik yang diambil harus mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.
- b. Tahap kedua yaitu agenda kebijakan, pada tahap ini perumus kebijakan memilah masalah-masalah publik yang ada, karena tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Menurut Winarno (2014) masalah-masalah publik yang ada akan saling bersaing satu dengan yang lainnya agar dapat masuk kedalam sebuah agenda kebijakan.
  - c. Tahap ketiga adalah pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, setelah masalah publik didefinisikan dengan jelas dan pembuat kebijakan secara kolektif sepakat untuk memasukkan masalah publik terpilih ke dalam agenda kebijakan, langkah selanjutnya adalah mencari solusi dari masalah tersebut. Dalam memecahkan masalah, pembuat kebijakan mengembangkan berbagai alternatif kebijakan untuk mendukung proses formulasi kebijakan. Alternatif kebijakan perlu disesuaikan dengan permasalahan yang ada, kemudian setelah sejumlah alternatif kebijakan yang ada telah terkumpul, pembuat kebijakan harus memutuskan kebijakan mana yang sesuai dengan masalah yang ada.
  - d. Tahap akhir dari formulasi kebijakan adalah tahap penetapan kebijakan. Setelah pembuat kebijakan menyusun berbagai alternatif kebijakan kemudian berbagai alternatif kebijakan yang ditentukan tersebut digunakan sebagai sarana pemecahan masalah publik. Dengan demikian, tahap akhir formulasi kebijakan menjadi mengikat secara hukum saat penetapan kebijakan yang dipilih. Keputusan kebijakan itu sendiri dapat berupa undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan menteri, dan lainnya.

Dari tiga tahapan formulasi kebijakan yang dikemukakan oleh Widodo (2007), Winarno (2014), dan Hasbullah (2015) peneliti memilih menggunakan tahap formulasi kebijakan yang dikemukakan Winarno

(2014) dalam melihat proses formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lampung Utara. Proses formulasi kebijakan atau pembentukan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Lampung Utara jika dilihat dalam Naskah Akademik dan keterangan yang di sampaikan oleh Tabrani Rajab meliputi:

a. Perencanaan

Menurut Tabrani Rajab, perencanaan ini dilakukan dengan melaksanakan sidang paripurna tingkat 1 untuk membahas program legislasi daerah (prolegda). Pada pelaksanaan paripurna tingkat 1 tersebut, DPRD Kabupaten Lampung Utara membahas judul-judul yang akan dibuatkan PERDA. Pemaparan masalah-masalah tersebut dilakukan dengan memaparkan materi serta konsep dari isi RAPERDA yang akan dibuat. Konsep RAPERDA yang disusun oleh DPRD Kabupaten Lampung Utara sebelumnya dilakukan musyawarah oleh stakeholder terkait yang disesuaikan dengan penyusunan kebijakan yang sedang direncanakan.

b. Penyusunan

Menurut Tabrani Rajab, setelah judul masalah dipilih dan didapatkan masalah yang akan dibahas untuk dibuatkan PERDA. Maka DPRD Kabupaten Lampung Utara yaitu BAPEMPERDA melakukan kontrak kerjasama bersama dengan Akademisi yaitu Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi. Akademisi menyusun Naskah Akademik (NA) dan mentahan RAPERDA berdasarkan konsep yang telah diberikan oleh DPRD Kabupaten Lampung Utara.

c. Pembahasan

Menurut Tabrani Rajab, pembahasan ini dilakukan bersamaan saat penyusunan NA dan RAPERDA. Setelah NA dan mentahan RAPERDA selesai dikaji oleh akademisi maka RAPERDA tersebut diserahkan kepada pansus DPRD Kabupaten Lampung Utara untuk membahas permasalahan yang terjadi terkait penyaluran dari

program pada RAPERDA yang sedang dirumuskan ini. Hal tersebut dilakukan bersama-sama dengan OPD yang melakukan kerjasama pada tiap komisi yang disesuaikan dengan penyusunan kebijakan yang sedang dibahas.

d. Pengesahan

Menurut Tabrani Rajab, setelah mentahan RAPERDA selesai dibuat, maka mentahan RAPERDA tersebut dilakukan paripurna pengesahan, paripurna pengesahan dilakukan agar RAPERDA tersebut dapat dilimpahkan ke Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk selanjutnya disahkan menjadi sebuah PERDA.

e. Pengundangan

Rohmiyati mengatakan, bahwa pengundangan ini dilakukan setelah nomor registrasi dan penanggalan telah terbit. Yang selanjutnya RAPERDA disahkan menjadi PERDA dengan menerbitkan nomor PERDA, kemudian PERDA tersebut diundangkan atau ditandatangani oleh bupati sehingga RAPERDA yang disusun telah sah menjadi sebuah PERDA.

#### **2.4.4 Aktor-aktor Dalam Formulasi Kebijakan Publik**

Tahap formulasi kebijakan publik, akan melibatkan aktor-aktor dalam formulasi kebijakannya. Dalam hal ini, aktor perumusan kebijakan dibagi ke dalam dua kelompok yaitu pemeran serta resmi dan pemeran serta tidak resmi. Berikut penjelasan pemeran serta resmi dan pemeran serta tidak resmi:

- a. Pemeran serta resmi dalam perumusan kebijakan meliputi badan-badan administrasi (agen-agen pemerintah), lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Saat ini badan administrasi telah ikut serta dalam pembuatan atau pengembangan sebuah kebijakan publik, badan administrasi dalam hal ini dapat membuat maupun melanggar

undang-undang atau kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Badan administrasi juga menjadi sumber utama dalam usul-usul pembuatan sebuah kebijakan publik yang terdapat dalam sistem politik seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan Inggris Winarno (2014). Kemudian lembaga eksekutif, dalam hal ini presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai peran dalam perumusan sebuah kebijakan publik. Keterlibatan presiden tersebut dapat dilihat dari komisi-komisi presidensial, maupun yang ada dalam sebuah rapat kabinet, sehingga hal tersebut memberikan wewenang yang besar kepada lembaga eksekutif dalam menjalankan pemerintahannya. Selain lembaga eksekutif terdapat pula lembaga yudikatif, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif ini mempunyai sebuah tinjauan yaitu tinjauan yudisial, tinjauan yudisial merupakan kekuasaan pengadilan untuk dapat menentukan tindakan yang diambil oleh cabang eksekutif maupun legislatif telah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Sehingga, jika tindakan atau keputusan yang ada tersebut bertentangan dengan konstitusi negara, maka lembaga yudikatif ini dapat membatalkan terhadap kebijakan publik yang telah ditetapkan. Kemudian terakhir lembaga legislatif, dalam hal ini bersama dengan lembaga eksekutif, lembaga legislatif memegang peran yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan sebuah undang-undang dapat dikatakan sah jika telah disahkan oleh lembaga legislatif sebelumnya Winarno (2014).

- b. Selain pemeran serta resmi, terdapat pula pemeran serta tidak resmi yang meliputi kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara individu. Kelompok kepentingan ini akan memainkan peran penting dengan kegiatan yang lebih terbuka dalam sistem politik demokratik dibandingkan dengan sistem politik otoriter. Kelompok kepentingan memiliki fungsi artikulasi kepentingan yaitu menyatakan tuntutan serta memberikan alternatif terhadap sebuah tindakan kebijakan. Kemudian partai politik, pada umumnya partai politik ini memiliki jangkauan yang sangat luas dibandingkan dengan

kelompok kepentingan, namun partai politik ini cenderung bertindak hanya sebagai perantara daripada sebagai pendukung kepentingan tertentu dalam sebuah pembentukan kebijakan publik. Terakhir yaitu warga negara individu, peran serta warga negara individu dalam sistem politik walaupun sistem politik demokrasi, mempunyai peran yang rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak memberikan suara saat pemilihan umum, kemudian tidak ikut serta dalam kegiatan partai politik, tidak terlalu terlibat dalam kelompok penekan, dan memiliki perhatian yang rendah dalam sistem politik. Walaupun terdapat kritikan-kritikan yang ada sebelumnya mengenai keikutsertaan warga negara dalam sistem politik, Charles Lindblom dalam Winarno (2014) mengatakan pada rezim demokratik warga negara akan memilih para pembentuk kebijakan dalam pelaksanaan pemilihan-pemilihan yang murni.

Dari penjelasan mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan, akan menjadikan sebuah acuan untuk melihat aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Lampung Utara, serta melihat aktor mana yang paling mempengaruhi dalam perumusan sebuah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara.

#### **2.4.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Formulasi Kebijakan**

Kepentingan yang ada dalam proses formulasi kebijakan menjadikan sebuah masalah tersendiri bagi pembuat kebijakan. Menurut Nigro and Nigro dalam Islamy (1991) dalam Irwan Abdu Nugraha (2017) mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi proses formulasi kebijakan meliputi:

- a. Adanya pengaruh tekanan dari luar

Formulasi kebijakan terdapat sebuah pendekatan yaitu “*rationalle comprehensive*”, dalam hal ini administrator yang merupakan pembuat

keputusan harus dapat mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih didasarkan pada penilaian rasional semata, namun proses dan formulasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata, yang kemudian memunculkan tekanan yang berasal dari luar dan ikut berpengaruh dalam sebuah proses formulasi kebijakan.

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan yang lama pada sebuah organisasi seperti kebiasaan investasi modal, sumber-sumber waktu dalam suatu program tertentu cenderung akan lebih diikuti, walaupun keputusan tersebut telah mendapatkan banyak kritikan dan perlunya perubahan, apalagi jika suatu kebijakan yang ada telah diasumsikan memuaskan.

c. Adanya pengaruh sifat pribadi

Umumnya berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat pribadi pembuat keputusan tersebut, seperti terhadap proses penerimaan atau pengangkatan pegawai baru, seringkali sifat pribadi dari pembuat keputusan memiliki peran yang cukup besar.

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial para pembuat keputusan akan memiliki pengaruh yang besar, bahkan pembuat keputusan akan mempertimbangkan sebuah pengalaman dari orang lain yang sebelumnya orang tersebut berada diluar dari proses formulasi kebijakan.

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Pengalaman pembuat keputusan akan berpengaruh dalam pembuatan keputusan, seperti seringkalinya para pembuat keputusan membuat keputusan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, hal tersebut terjadi akibat adanya kekhawatiran bahwa delegasi wewenang dan tanggungjawab kepada orang lain akan disalahgunakan.

## 2.5 Kemiskinan

Menurut Nugroho (1995) dalam (Jacobus et al., 2019) kemiskinan muncul berdasarkan identifikasi dan pengukuran kelompok-kelompok dalam masyarakat yang dianggap miskin. Suryawati (2004) dalam (Jacobus et al., 2019) kemiskinan adalah suatu kondisi kenyataan bahwa pendapatan yang diperoleh tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup, sehingga hal tersebut kurang mampu untuk dapat menjamin kelangsungan hidup.

Menurut Mubyarto (1995) dalam (Arifin, 2020) mengatakan kemiskinan merupakan sebuah situasi yang serba kekurangan pada suatu kelompok masyarakat, hal tersebut terwujud dari bentuk rendahnya pendapatan yang dihasilkan yang disebabkan oleh rendahnya keterampilan seseorang, produktivitas, lemahnya nilai tukar produksi dan keterbatasan berperan dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu menurut Badan Pusat Statistik mengatakan kemiskinan merupakan sebuah keadaan atau kondisi kurang sejahtera yang dihitung dalam rupiah per kapita per bulannya.

Dari definisi yang ada di atas dapat disimpulkan, bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang yang memiliki pendapatan rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Sehingga kemiskinan yang dibahas pada penelitian ini ialah jenis kemiskinan absolut, Sumodiningrat (1999) dalam Annur (2013) terdapat klasifikasi kemiskinan yang dibagi kedalam lima kelas meliputi kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, kemiskinan kronis, dan kemiskinan sementara. Pada penelitian ini kemiskinan yang dimaksud ialah kemiskinan absolut, kemiskinan absolut selain ditinjau dari pemenuhan kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat merasakan kehidupan layak, juga ditentukan dengan melihat tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan Annur (2013). Sehingga kemiskinan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kemiskinan tentang materi. Karakteristik yang dilihat pada permasalahan kemiskinan ini ialah

mengenai pekerjaan dominan yang ada di Kabupaten Lampung Utara, sehingga dapat mengetahui apakah program yang dibuat sudah tepat sasaran atau tidak.

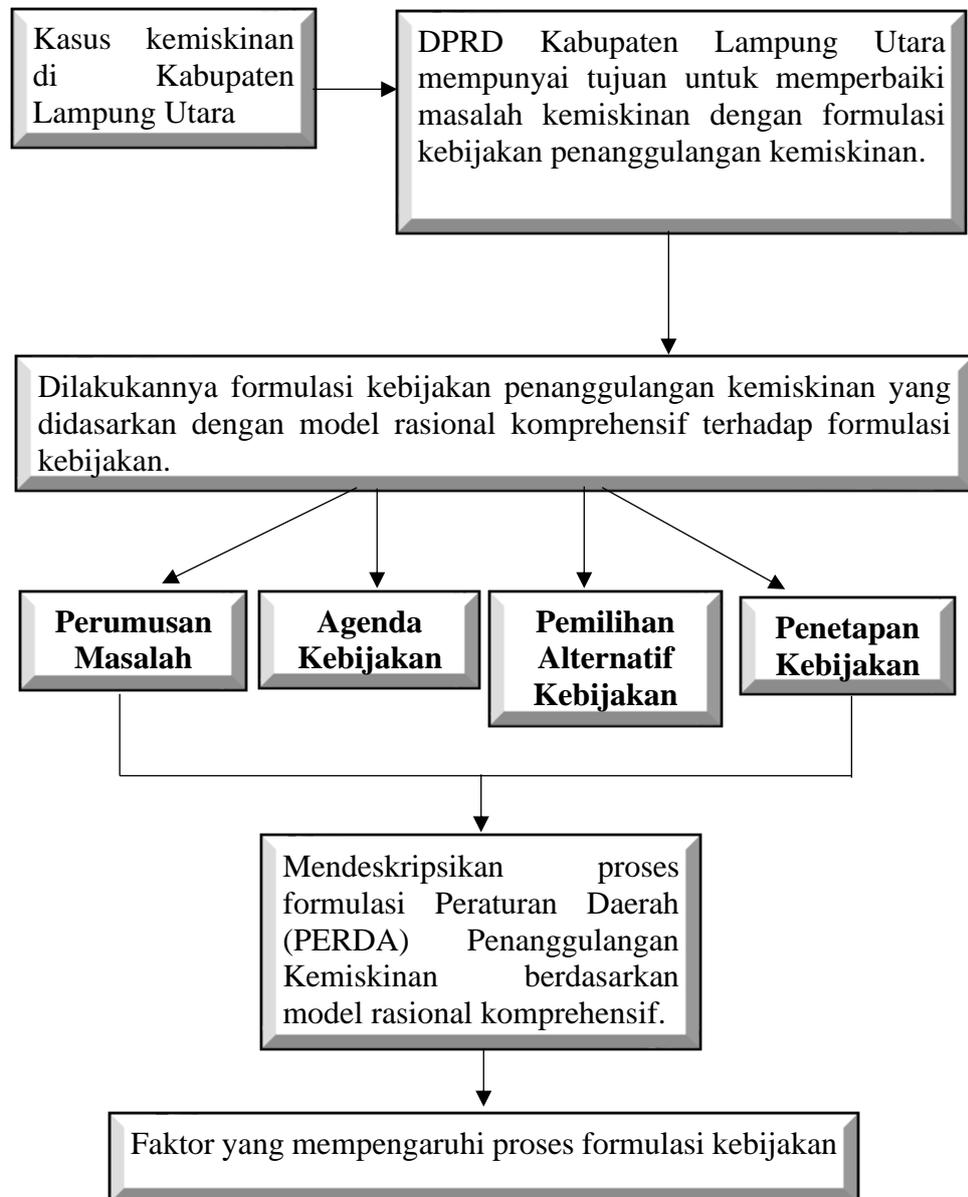
## **2.6 Masyarakat Miskin**

Masyarakat miskin adalah sebuah pengecualian dari hukum yang seringkali tidak adil dan menutup kesempatan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ini sebagian besar berlaku untuk banyak negara berkembang dan miskin di seluruh dunia. Kemiskinan itu sendiri, baik yang terjadi pada individu, keluarga, maupun kelompok, dapat diartikan sebagai keadaan ketidakmampuan yang membuat masyarakat rentan terhadap masalah sosial dari keadaan kemiskinan tersebut. Kemiskinan kini dilihat sebagai kondisi yang dialami oleh individu maupun kelompok yang tidak mampu sepenuhnya memenuhi haknya untuk hidup bermartabat. Dengan latar belakang tersebut, kemiskinan tidak lagi dilihat sebagai hambatan ekonomi, tetapi sebagai kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perlakuan yang tidak setara terhadap individu atau sekelompok orang. Hidup dalam kemiskinan dalam hal ini tidak hanya terkait dengan masalah kekurangan sandang, pangan, dan papan, tetapi kemiskinan ini terkait dengan kebutuhan hidup meliputi ilmu pengetahuan, informasi, teknologi dan permodalan. Dalam keadaan seperti itu, orang miskin sering diperlakukan buruk dalam segala hal (Rahmat, 2017).

Menurut Annur (2018) masyarakat miskin tidak memiliki akses terhadap sarana dan prasarana dasar yang memadai. Bahkan kondisi kehidupan masyarakat miskin jauh dari standar kelayakan yang ada. Selain itu, mata pencaharian masyarakat miskin sebagian besar tidak menentu. Untuk mengukur tingkat kemiskinan masyarakat miskin biasanya dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat pendapatan individu atau keluarga dengan tingkat pengeluaran mereka untuk kebutuhan dasar, yang merupakan akibat

dari distribusi yang tidak merata. Faktor pendidikan juga mempengaruhi perkembangan masyarakat miskin, karena kualitas sumber daya manusia (SDA) masih di bawah rata-rata karena kurangnya pendidikan dan pengetahuan Miradj, Safri Shofwan (2021).

## 2.7 Kerangka Pikir



**Gambar 1. Bagan Kerangka Berfikir**

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2022

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Burengge, 2020). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa, gejala, dan kejadian yang terjadi pada saat ini. Menurut Mely G. Tan dalam Koentjaraningrat (1981) dalam Zellatifanny & Mudjiyanto (2018) penelitian deskriptif memungkinkan kita untuk menggambarkan secara akurat karakteristik, situasi, dan frekuensi yang memiliki hubungan khusus antara gejala yang satu dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif itu sendiri adalah tipe penelitian yang semata-mata berkaitan dengan pengidentifikasian ciri-ciri atau ciri khas yang ada dalam kelompok orang, benda, atau peristiwa dalam suatu lokasi penelitian. Penelitian pendekatan kualitatif sendiri merupakan tipe penelitian yang menggunakan pendekatan konseptual dan membuat skema dalam bentuk klasifikasi (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018).

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berfungsi membatasi dan mempertajam penelitian. Fokus penelitian ini juga dimaksudkan untuk membatasi studi pengumpulan data sehingga dapat memilih antara data yang relevan dan tidak relevan untuk digunakan. Dengan adanya batasan-batasan penelitian ini, memungkinkan peneliti lebih fokus dalam memahami masalah yang menjadi tujuan penelitiannya. Penelitian ini sendiri akan berfokus terhadap proses formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Lampung Utara berdasarkan teori formulasi kebijakan Winarno (2014) yaitu perumusan masalah (*defining problem*), agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan yang didasarkan pada model rasional komprehensif. Formulasi kebijakan pada penelitian ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan untuk melihat:

1. Aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.
2. Proses dari formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah berdasarkan model rasional komprehensif meliputi:
  - a. Isu, masalah, tujuan, nilai, serta sasaran yang ada dalam formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.
  - b. Agenda kebijakan dalam proses formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.
  - c. Alternatif kebijakan dan konsekuensi dalam proses formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.
  - d. Penetapan kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah.
3. Faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.
  - a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
  - b. Adanya pengaruh kebiasaan lama
  - c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
  - d. Adanya pengaruh dari kelompok luar
  - e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di DPRD Kabupaten Lampung Utara, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara, dan Fakultas Hukum dan Ilmu sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi yang melaksanakan formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara. Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti dapat melakukan penelitian yang bertujuan untuk memahami peristiwa dan kejadian sebenarnya terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data yang valid dan benar. DPRD Kabupaten Lampung Utara terletak di Provinsi Lampung dan beralamatkan di Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut pendapat Arikunto (2010), mengatakan instrumen pengumpulan data ialah langkah yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Dikatakan untuk mendapatkan data yang relevan terkait penelitian yang sedang dijalankan dan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti maka diperlukannya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi dan wawancara terstruktur.

1. Observasi adalah suatu kegiatan terhadap suatu objek atau proses yang dilakukan untuk memahami pengetahuan terhadap peristiwa yang terjadi, berdasarkan pandangan dan tanggapan yang ada. Peneliti mengamati secara langsung terhadap permasalahan kemiskinan melalui data yang tersedia pada laman Badan Pusat Statistik dan peneliti juga melakukan pengamatan mengenai harga singkong yang anjlok di Kabupaten Lampung Utara melalui laman Kupastuntas.
2. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi tentang penelitian. Informasi yang diterima dapat diberikan dalam bentuk

tertulis, rekaman, visual, dan audio. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dari sumber data yang ada dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, proses formulasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara dan factor-faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Data dalam penelitian ini didapat dari informan dengan pengetahuannya. Dalam penelitian ini berikut informan yang menjadi narasumber yaitu:

**Tabel 2. Informan Penelitian**

No	Informan	Jabatan
1	Tabrani Rajab S.Ag	Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (Mantan Ketua BAPEMPERDA)
2	Agus Nugroho, S.H	Staf Pengkajian Hukum (Staf Teknis BAPEMPERDA)
3	Dwi Saputra S.H	Staf Teknis Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Utara
4	Eka Dharma Thohir S.H, M.H	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara
5	Rohmiati, S.H	Sub Koordinator Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara
6	Muhammad Ruhly Kusumadinata S.H, M.H	Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kotabumi
7	Yuhendri	Masyarakat

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2022

3. Dokumentasi, teknik dokumentasi ini digunakan untuk menyimpan data berupa informasi yang relevan dengan penelitian untuk kepentingan penelitian, dengan menggunakan alat bukti yang valid pada media rekam dan sumber seperti dokumen, undang-undang, dan gambar. Prosedur ini dilakukan untuk mendapatkan data di DPRD Provinsi Lampung Utara.

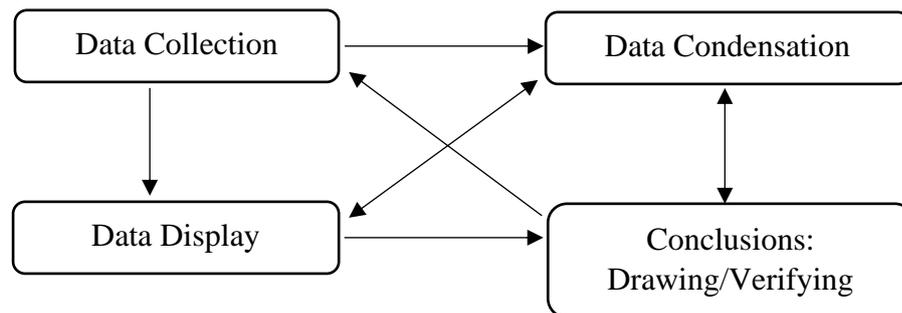
**Tabel 3. Daftar Dokumen Yang Berkaitan Dengan Penelitian**

No.	Nama Dokumen
1.	Dokumentasi aktor formulasi, BAPEMPERDA, Akademisi, Panitia Khusus, Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, dan Kementerian Sosial RI
2.	Dokumentasi pelaksanaan formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan
3.	RAPERDA Penanggulangan Kemiskinan
4.	PERDA No. 9 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan
5.	Naskah Akademik RAPERDA Penanggulangan Kemiskinan

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2023

### 3.5 Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan menganalisis data yang telah terkumpul sebelumnya (Jaya, 2020). Huberman, Saldana (2014) hal-hal yang ada pada teknik analisis data meliputi:



**Gambar 2. Teknik Analisis Data**

Sumber: Miles, M. B., & Huberman, A.M:2014

#### 1. *Data Collection*

*Data collection* dalam penelitian kualitatif ini bersifat interaktif, hal tersebut berlangsung dalam sebuah lingkaran yang saling tumpang tindih. Peneliti dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi fokus masalah yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini data-data yang dikumpulkan adalah aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan, proses formulasi, dan faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lampung Utara.

#### 2. Kondensasi data

Kondensasi data ini pada hakikatnya mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data dari catatan lapangan dan lokasi penelitian menjadi tulisan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi-materi empiris. Atau, kondensasi data ini terjadi ketika seorang peneliti menyelesaikan serangkaian kegiatan, seperti

wawancara, dan peneliti memperoleh data tertulis dalam penelitiannya. Transkrip wawancara yang telah dilakukan sebelumnya kemudian diseleksi oleh peneliti untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan.

### 3. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan terhadap informasi yang diterima, menarik kesimpulan, dan pengambilan sebuah tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif itu sendiri berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk-bentuk yang ada kemudian membentuk susunan dalam format yang konsisten dan mudah dipahami. Hal tersebut membuat lebih mudah untuk mengidentifikasi kondisi apa yang terjadi dan menentukan apakah kesimpulan yang ditarik benar atau apakah analisis ulang harus dilakukan.

### 4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini dilakukan oleh peneliti yang dilakukan secara terus menerus selama berada di lokasi penelitian. Dimulai dengan proses pengumpulan data, penelitian kualitatif sendiri mulai mencari makna pada sesuatu dengan melihat pola-pola yang teratur (catatan teoretis), penjelasan, kemungkinan konfigurasi, alur sebab akibat, dan proposisi. Penarikan kesimpulan selama penelitian dalam bentuk meninjau kembali teks, meninjau catatan di lapangan, tukar pikiran, dan upaya untuk memasukkan salinan temuan ke dalam data yang ada.

## 3.6 Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan sebuah data yang ada dalam penelitian, dibutuhkannya sebuah teknik pemeriksaan Mekarisce (2020). Terdapat 4 kriteria dalam memeriksa keabsahan data yang meliputi:

### 1. Uji Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Dalam penelitian kualitatif, data dikatakan kredibel jika terdapat kesamaan antara apa yang disajikan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji kredibilitas data meliputi memperluas pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan *member check*. Kriteria dalam penentu keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah dari derajat kepercayaanya.

#### a. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan adalah kegiatan berupa pengecekan ulang apakah data yang diterima sudah benar. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terus menerus, membaca buku, mengamati studi yang ada, atau dokumen yang tersedia sebelumnya untuk membantu peneliti mendapatkan wawasan yang lebih luas Mekarisce (2020).

#### b. Triangulasi

Tujuan triangulasi merupakan kegiatan untuk meningkatkan kekuatan teoretis, metodologis, dan interpretatif yang ada dari penelitian kualitatif. Triangulasi juga dikatakan sebuah kegiatan berupa pengecekan kembali data melalui sumber, teknik, dan waktu Mekarisce (2020). Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber yang dilakukan dengan kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi sumber adalah kegiatan peninjauan kembali data yang diperoleh sebelumnya dari sumber yang ada. Wawancara berfungsi untuk memenuhi data primer yang tidak didapatkan pada kegiatan observasi. Observasi berfungsi untuk melihat keadaan yang dilakukan secara langsung terhadap kondisi yang terjadi pada pelaksanaan di lokasi. Sedangkan dokumentasi berfungsi sebagai penunjang data pada penelitian yang dilakukan. Triangulasi sumber merupakan sebuah teknik pengujian data serta mencari informasi data yang sama antara informan yang satu dengan informan lainnya. Data dari informan akan dikomplikasikan dengan hasil observasi dan dokumentasi yang memiliki sebuah kesamaan informasi. Informan

tersebut berasal dari anggota dewan DPRD Kabupaten Lampung Utara, Staf Teknis BAPEMPERDA, Wakil Dekan FHIS Universitas Muhammadiyah Kotabumi, dan Sub Koordinator Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara, dan masyarakat Kabupaten Lampung Utara.

2. Uji Keteralihan (*transferability*)

Pada penelitian kualitatif, transferabilitas tergantung terhadap pembaca penelitian peneliti, dimana sejauhmana peneliti tersebut diterapkan konteks dan kondisi sosial yang berbeda Mekarisce (2020). Sehingga harus memberikan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis, dengan demikian penelitian mengenai formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah (studi tentang model rasional komprehensif terhadap formulasi kebijakan) dapat dipercaya.

3. Uji Ketergantungan (*dependability*)

Uji dependabilitas itu sendiri dapat dilakukan dengan melakukan prosedur audit atas seluruh proses penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian yang dilakukan dapat dikatakan *dependable* apabila peneliti tidak dapat membuktikan bahwa sebagian besar proses penelitian benar-benar dilakukan selama berlangsungnya penelitian Mekarisce (2020). Uji ketergantungan ini bertujuan untuk memastikan hasil dari penelitian mengenai formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah (studi tentang model rasional komprehensif terhadap formulasi kebijakan) telah berjalan dengan baik atau tidak berjalan dengan baik. Pengujian terhadap data penelitian dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian.

4. Uji Kepastian (*confirmability*)

Uji kepastian dalam penelitian memiliki konsep transparansi yang dapat diverifikasi bahkan dalam penelitian yang dilakukan dengan pendekatan

kualitatif. Memiliki sebuah ketersediaan untuk mempublikasikan proses dan poin penelitian. Ini memberikan kesempatan terbuka bagi pihak lain untuk mengevaluasi hasil dan mendapatkan persetujuan dari mereka Mekarisce (2020). Sehingga, pada tahap uji kepastian ini peneliti harus mampu menjelaskan proses awal hingga akhir penelitian mengenai formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah (studi tentang model rasional komprehensif terhadap formulasi kebijakan)

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah (studi tentang model rasional komprehensif terhadap formulasi kebijakan) berdasarkan rumusan masalah yang ada meliputi:

a) Aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan:

1. Pemeran serta resmi

Dalam formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara, pemeran serta resmi yang terlibat ialah DPRD Kabupaten Lampung Utara, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara, Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, Biro Kesra Provinsi Lampung, dan Kementerian Sosial RI. Pada aktor resmi ini, DPRD Kabupaten Lampung Utara memiliki peran yang dominan dalam menetapkan RAPERDA Penanggulangan Kemiskinan. Aktor-aktor lain seperti Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara hanya terlibat dalam proses penetapan menjadi PERDA, Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara hanya terlibat dalam membantu DPRD Kabupaten Lampung Utara membahas urgensi di tengah masyarakat, Biro Kesra Provinsi Lampung dan Kementerian Sosial

RI hanya terlibat dalam pelaksanaan konsultasi oleh DPRD Kabupaten Lampung Utara

2. Pemeran tidak resmi

mereka ikut dalam proses formulasi kebijakan, namun pemeran serta tidak resmi ini tidak memiliki kewenangan untuk dapat mengubah atau menetapkan kebijakan yang dibuat. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses formulasi kebijakan publik ini, hal tersebut selaras dengan pernyataan Winarno (2014) bahwa warga negara individu atau masyarakat seringkali diabaikan dalam hubungannya dengan legislatif.

b) Proses fomulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Daerah

Hasil dari penelitian ini, PERDA Penanggulangan Kemiskinan yang di susun oleh DPRD Kabupaten Lampung Utara itu ideal yang di tinjau dari perspektif rasional komprehensif. Menurut Hoogerwerf dalam Islamy (1988) dalam Mulyana et al (2019) bahwa model rasional komprehensif ini adalah salah satu kegiatan analisis yang berasal dari sudut hasil atau dampak yang memiliki maksud bahwa proses perumusan kebijakan publik itu akan memberikan dampak yang baik, jika didasarkan pada proses pemikiran yang rasional yang pastinya didukung oleh data maupun informasi yang lengkap (komprehensif). Kegiatan analisis pastinya dilakukan dengan sangat teliti, cermat, dan detail dengan memanfaatkan sejumlah besar data mauapun informasi yang harus dikumpulkan, sehingga menghasilkan sebuah kebijakan yang memberikan dampak positif.

Dilihat dari perspektif rasional yang mengatakan didasarkan pada proses pemikiran yang rasional, artinya aktor yang yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan ini sudah sesuai dengan kajian kebijakannya yang artinya pemikiran mengenai penyebab kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Lampung Utara telah

dijabarkan dengan lengkap oleh Dinsos Kabupaten Lampung Utara, yang kemudian penjelasan mengenai penyebab kemiskinan tersebut akan disinkronisasikan dalam pembentukan program pada PERDA Penanggulangan Kemiskinan. Pemikiran-pemikiran yang rasional tersebut harus didukung oleh data maupun informasi yang lengkap atau komprehensif. Sehingga pemikiran yang diberikan oleh Dinsos Kabupaten Lampung Utara mengenai penyebab kemiskinan dapat dibuktikan kebenarannya. Informasi tersebut didukung dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Dinsos Kabupaten Lampung Utara dan data dari BPS Kabupaten Lampung Utara mengenai angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara dan data mengenai tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Namun walaupun model rasional komprehensif ini telah membantu dalam melihat kebijakan yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Lampung Utara, tidak dipungkiri terdapat kelemahan saat menggunakan model rasional komprehensif tersebut. Menurut Charles E. Lindblom dalam Winarno (2014) model rasional komprehensif ini memiliki beberapa kritik yang menjadi kelemahan dari model ini, berikut penjelasannya:

- a. Para pembuat keputusan tidak dihadapkan dalam sebuah permasalahan yang konkret dan jelas, sehingga keputusan yang dikeluarkan menjadi tidak tepat. Seperti halnya formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lampung Utara, dalam menggali isu kemiskinan masih meninggalkan berbagai aspek masalah yang jelas mengenai penyebab dari kemiskinan, walaupun sebelumnya penyebab masalah kemiskinan sudah diketahui dan dijelaskan. Tetapi, hal tersebut tidak dapat didukung oleh fakta atau bukti nyata, hanya didukung dengan data yang bersifat general saja, sehingga menimbulkan spekulasi apakah penjelasan tersebut benar adanya atau hanya kebutuhan politik semata. Kondisi seperti ini akan menyebabkan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah akan menjadi boomerang tersendiri bagi masyarakatnya.

- b. Model rasional komprehensif menurut para pengkritik tidak realistis terhadap tuntutan yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Hal tersebut biasanya dikarenakan para pembuat kebijakan dihadapkan oleh waktu yang tidak memadai. Seperti yang telah terjadi pada perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan ini, proses penyusunan kebijakan hanya memerlukan waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, yang jika dilihat, permasalahan kemiskinan membutuhkan penanganan yang kompleksitas.

Dengan adanya keterbatasan atau kelemahan dari model rasional komprehensif, memberikan sebuah temuan baru bahwa model rasional komprehensif tidak seideal yang diperbincangkan dikalangan para ahli. Karena kelemahan tersebut akan berpengaruh pada proses pencapaian kata ideal terhadap sebuah kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan.

- c) Faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan:
  - 1. Adanya pengaruh tekanan dari luar  
Dalam formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan ini, pengaruh tekanan dari luar tidak terjadi, hal tersebut hanya berupa pendapat yang berasal dari akademisi, legislatif, maupun eksekutif yang memang terjadi ketika melaksanakan formulasi terhadap sebuah kebijakan. Untuk organisasi atau pihak lain diluar masyarakat, akademisi, legislatif, dan eksekutif tidak ada yang memberikan tekanan selama proses formulasi kebijakan.
  - 2. Adanya pengaruh kebiasaan lama  
Pengaruh kebiasaan lama dalam perspektif negatif, dalam organisasi mana pun itu pastinya akan mempertahankan sebuah strukturisasi kerja yang baik sehingga untuk yang buruknya tidak

dijalankan. Namun dalam dunia politik, yang namanya merebut kekuasaan itu sudah menjadi kegiatan yang lumrah, hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan aturan-aturan yang baru yang akan mendukung pencapaian kekuasaan tersebut. Sehingga sedikit banyaknya dalam proses formulasi kebijakan ini pengaruh kebiasaan lama terjadi, seperti saling mengkritik kinerja antar pembuat kebijakan dalam formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan ini dan merupakan sebuah pertarungan politik dalam merebut kekuasaan.

3. Adanya pengaruh sifat pribadi

Pengaruh sifat pribadi sangat berpengaruh dalam proses formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, seperti halnya pengetahuan dari pembuat kebijakan itu sendiri. Pengalaman dari pembuat kebijakan juga akan menjadi pengaruh yang besar saat mengaplikasikannya kedalam kegiatan formulasi kebijakan tersebut. Selain pengetahuan dan pengalaman, kedisiplinan pembuat kebijakan juga berpengaruh dalam formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan ini. Saat ini menurut keterangan dari pembuat kebijakan, BAPEMPERDA sendiri sudah disiplin dalam mengikuti tahap-tahap formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan ini.

4. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Bahwa untuk pengaruh yang berasal dari kelompok luar itu tidak terjadi berkenaan dengan hal yang negatif. Dalam prosesnya hanya sebatas kegiatan konsultasi yang dilakukan untuk menyempurkan isi RAPERDA Penanggulangan Kemiskinan tersebut.

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Dalam proses perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan ini, berdasarkan keterangan dari pembuat kebijakan bahwa

pengaruh keadaan masa lalu ini tidak terjadi karena penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan disesuaikan berdasarkan kondisi terkini. Namun, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti program kebijakan yang dipakai dalam PERDA No 2 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Kemiskinan dan PERDA No 9 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan terdapat persamaan antara keduanya. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa keadaan masa lalu masih ada saat proses perumusan kebijakan sebagai bahan perbandingan.

Penelitian Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (Studi Tentang Model Rasional Komprehensif Terhadap Formulasi Kebijakan) ternyata dapat mengisi kekosongan pada hasil penelitian terdahulu dan juga mengembangkan hasil penelitian terdahulu mengenai tahapan formulasi kebijakan publik dalam penanggulangan kemiskinan serta upaya yang dilakukannya pada penelitian Berger et al (2018), Zhou et al (2018), Irwan Abdu Nugraha (2017), dan Xler (2022) riset ini menguatkan temuan penelitian sebelumnya mengenai penyebab kemiskinan yang terjadi pada setiap daerah itu berbeda sehingga dilakukannya sebuah upaya dengan merumuskan atau membuat sebuah kebijakan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada pada setiap daerah tersebut. Penelitian terdahulu oleh Ilhami (2011) menguatkan penggunaan model rasional komprehensif pada proses perumusan kebijakan, walaupun tidak menutup kemungkinan terdapat kelemahan dalam model rasional komprehensif yang menjadikan beberapa tahap dalam menelaah masalah publik menjadi kurang konkret.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (Studi Tentang Model Rasional Komprehensif Terhadap Formulasi Kebijakan) antara lain:

### 1. Bagi Pembuat Kebijakan

DPRD Kabupaten Lampung Utara dan pihak akademisi agar lebih mengulik lebih dalam permasalahan yang diangkat ketika akan dirumuskan menjadi sebuah kebijakan. Sumber-sumber data dapat diambil dan dilihat dari berbagai sumber sesuai dengan kebijakan yang akan dibuat. Sehingga sebab akibat dari adanya permasalahan yang terjadi di Kabupaten Lampung Utara dapat diketahui secara detail. Dengan begitu, dapat mengetahui permasalahan secara detail.

2. Bagi pembuat kebijakan agar dalam perencanaan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat dapat dipertimbangkan secara matang, agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dengan dilaksanakannya seluruh program yang ada dan tercapai sesuai sasaran atau target.

3. Bagi pembuat kebijakan agar partisipasi dari masyarakat dapat diikutsertakan, karena kebijakan tersebut nantinya akan dirasakan dan bermanfaat oleh masyarakat.

4. Bagi pembuat kebijakan tidak terburu-buru dalam menyusun sebuah kebijakan. Karena kebijakan yang dibuat haruslah memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan melakukan pertimbangan yang matang. Tetapi juga jangan terlalu lama dalam menyusun kebijakan, karena jika terlalu lama terdapat kemungkinan isi kebijakan sudah disusun tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini.

5. Bagi pembuat kebijakan, agar dalam menyusun kebijakan dilakukan benar adanya berdasarkan kepentingan masyarakat. Bukan dikarenakan kepentingan politik dalam menunjang merebut kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alaslan, A. (2021). *Kebijakan Publik*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada
- Anderson, J. E. (1970). *Public Policy Making*. New York: Reinhart and Wiston.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya
- Cairney, P. (2020). *Understanding Public Policy Theories and Issues* (Second Edition). London: Red Globe Press.
- Duadji Noverman, T. N. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik Pentingnya Kapital Sosial Dan Koproduks*. Yogyakarta: Suluh Media
- Dunn, W. N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction, Englewood Cliffs*. New Jersey: Prentice Hall. Inc.
- Dye, T. R. (1995). *Understanding Public Policy: Eleventh Edition*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Huberman, Saldana, M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Miradj, Safri Shofwan, I. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Proses Pendidikan Non Formal*. Madiun: CV. Bayfa Cendikia Indonesia.
- Mutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja
- Ralph C, Chandler, Jack C, P. (1988). *The Public Administration Dictionary. Second Edition*. Santa Barbara: ABC-CLIO.Inc.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (keduabelas). Malang: Media Nusa Creative.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus (Edisi&Revisi Terbaru)*. Yogyakarta: CAPS.

## Jurnal

Ani, Serli dan Budi Sulistio, E. (2017). Implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, Dan Guideline) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Provinsi Lampung Tahun 2016. *Jorunal Administrasi Publik ADMINISTRATIO*, 8(1), 99–107. [lppm.unila.ac.id](http://lppm.unila.ac.id)

Annur, R. A. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 409–426.

Annur, H. (2018). Klasifikasi Masyarakat Miskin Menggunakan Metode Naive Bayes. *ILKOM Jurnal Ilmiah*, 10(2), 160–165. <https://doi.org/10.33096/ilkom.v10i2.303.160-165>

Arifin, J. (2020). Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2372>

Berger, L. M., Cancian, M., & Magnuson, K. (2018). Anti-poverty policy innovations: New proposals for addressing poverty in the United States. *Rsf*, 4(2), 1–19. <https://doi.org/10.7758/rsf.2018.4.2.01>

Burengge, S. S. (2020). Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dengan Pendekatan Kontekstual bagi Siswa SDN 7 Tentena Sulawesi Tengah. *Jurnal Paedagogy*, 7(4), 275. <https://doi.org/10.33394/jp.v7i4.2832>

Dunlop, C. A., Ongaro, E., & Baker, K. (2020). Researching COVID-19: A research agenda for public policy and administration scholars. *Public Policy and Administration*, 35(4), 365–383. <https://doi.org/10.1177/0952076720939631>

Irwan Abdu Nugraha. (2017). Proses Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. In *Ilmu Politik* (Vol. 8, Issue 2, pp. 19–29).

Jacobus, E. H., Kindangen, P. ., & Walewangko, E. N. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7), 86–103. <https://doi.org/10.35794/jpekd.19900.19.7.2018>

Li, S., Sui, P. C., Xiao, J., & Chahine, R. (2019). Policy formulation for highly automated vehicles: Emerging importance, research frontiers and insights. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 124(May 2018), 573–586. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.05.010>

- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Meta. (2018). Formulasi Kebijakan Peraturan Desa di Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(6), 54. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/19253>
- Muadi, S., Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Concept and Theory of Public Policy Formulation. *Jurnal Review Politik*, 06(2), 195–224.
- Mulyana, Y., Huraerah, A., & Martiawan, R. (2019). Model Kebijakan Mix Scanning Dalam Pengembangan Pariwisata Cianjur Selatan. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2). <https://doi.org/10.33005/jdg.v9i2.1627>
- Rahman Bp, A., Yusdayanti, Nawir, M., & Quraisy, H. (2022). Formulasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 132(1), 46–53.
- Rahmat, D. (2017). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 35–42. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.478>
- Rahmayuni, Y., Usman, J., & ... (2021). Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bulukumba. *Kajian Ilmiah Mahasiswa* 2(April). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3776>
- Salam, R. (2019). Peran Kebijakan Publik Dalam Mengentaskan Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 2(2), 119–128. <https://doi.org/10.54783/japp.v2i2.71>
- Sechele, L. (2018). Urban, Elite and Professional Bias in Public Policy Formulation in Botswana: The Case of Tribal Grazing Land Policy. *International Journal of Social Science Research*, 6(2), 33–43. <https://doi.org/10.5296/ijssr.v6i2.12347>
- Sidqi, R. J., & Mahmudin, M. S. (2019). Pemerataan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Gampong Paloh Kecamatan Pulo Aceh. *Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 3(4). <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/12486%0Ahttp://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/download/12486/5602>
- Sudartono, M., & Rachmandhani, M. S. (2021). Perumusan Kebijakan Pelayanan Pernikahan Selama Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2),

214–236. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3523>

Syuaib, M. R. (2020). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 2(2).

Xler, D. (2022). Formulasi Program Dana Bergulir Samisake Di Kota Bengkulu. *Jurnal Governance Dan Administrasi Publik*, 5(2), 1–11. <https://doi.org/10.33369/jgoap.v5i2.21251>

Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi The Type Of Descriptive Research In Communication Study. *Jurnal Diakom*, 1(2), 83–90.

Zhou, Y., Guo, Y., Liu, Y., Wu, W., & Li, Y. (2018). Targeted poverty alleviation and land policy innovation: Some practice and policy implications from China. *Land Use Policy*, 74(April 2017), 53–65. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.04.037>

## Skripsi

Ahmad, K. S. (2017). *Perumusan Kebijakan Perspektif Good Governance: (Studi Pada Proses Perumusan Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Pada Tahun 2015-2017)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hajra, S. (2022). *Penanggulangan Kemiskinan, Antara Pemerintah Dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota ParePare (Perspektif Ekonomi Islam)*. Institut Agama Islam Negeri ParePare.

Ilhami, D. (2011). *Analisis Kebijakan Publik Pada Undang-Undang Pornografi Komisi VIII DPR RI Perspektif Model Rasional Komprehensif*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rukmi, D. S. (2017). *Peran dan upaya pemerintah dalam penanganan kemiskinan di Kelurahan Danau Tundai dalam tinjauan ekonomi islam*. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1102/>

## Website

- Badan, P. S. (2022). *Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa), 2019-2021*. Diakses 25 Oktober 2022, dari <https://lampung.bps.go.id/indicator/23/34/1/jumlah-penduduk-miskin.html>
- Badan, P. S. (2021). *Kabupaten Lampung Utara Dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara. Diakses 6 Desember 2022, dari <https://lampungutarakab.bps.go.id/publication/2021/02/26/4b6724af2a9bb9c4ac1e526c/kabupaten-lampung-utara-dalam-angka-2021.html>
- Sosial, D. (2021). *Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Penjaringan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis di Sekitar Wilayah Kotabumi*. Diakses 20 Maret 2023, dari Dinsos.Lampungutarakab.Go.Id. <https://dinsos.lampungutarakab.go.id/pelaksanaan-kegiatan-monitoring-penjaringan-anak-jalanan-gelandangan-pengemis-disekitar-wilayah-kotabumi/>
- Tuntas, K. (2021). *Pabrik Singkong di Lampung Utara Tentukan Harga Sepihak, Petani Merugi*. Diakses 3 Maret 2023, dari Kupastuntas.Co. <https://kupastuntas.co/2021/02/20/pabrik-singkong-di-lampung-utara-tentukan-harga-sepihak-petani-merugi>